



RISALAH RAPAT KOMISI II DPR RI

-
- Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : II
Rapat Ke : -
Jenis Rapat : Rapat Kerja/RDP
Dengan : Menteri PANRB, dan Kepala BKN
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 21 Januari 2015
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara : 1. Perkenalan antara Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala BKN dan jajaran Kementerian PANRB serta jajaran BKN;
2. Rencana strategis Kementerian PANRB dalam susunan "Kabinet Kerja" 2014-2019;
3. Progress Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
4. Perkembangan penanganan pengangkatan Tenaga Honorar;
5. Paparan tentang terminology Revolusi Mental dan rencana moratorium pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
6. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN termasuk pembentukan Peraturan Pelaksanaannya serta kendala dan hambatannya.
- Ketua Rapat : **Rambe Kamarul Zaman/ Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
- Hadir : **A. Anggota Komisi II DPR RI.**
35 dari 50 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

1. RAMBE KAMARUL ZAMAN
2. Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
3. Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
4. Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.
5. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)

6. DIAH PITALOKA, S.sos
7. TAGORE ABUBAKAR
8. H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH

F-PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)

9. Drs. H. DADANG S MUCHTAR
10. Drs. A. H. MUJIB ROHMAT
11. Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR
12. TABRANI MAAMUN
13. AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si

GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)

15. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si
16. H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si
17. H. SUBARNA, SE., M.Si
18. SUASANA DACHI, SH
19. Ir. ENDRO HERMONO, MBA

F-PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

20. SAAN MUSTOFA, M.Si.
21. H. ZULKIFLI ANWAR
22. Ir. FANDI UTOMO
23. LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH

F-PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

24. YANDRI SUSANTO
25. H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.
26. AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn
27. AMRAN, S.E.

F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

28. H. YANUAR PRIHATIN, M.Si
29. Dr. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM

F-PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

30. H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.
31. Dr. H SA'DUDDIN, MM

F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

32. KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY
33. Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

F-PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

34. H. M. LUTHFI A. MUTTY

F-PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

35. Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH
36. Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH

B. Pemerintah

- Menteri PANRB (Dr. Yuddy Chisnandi)
- Kepala Badan Kepegawaian Negara RI (Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, M.Sis.)

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT (RAMBE KAMARUL ZAMAN/F-PG):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat tamu kami mitra kerja dari Komisi II Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta jajarannya;

Yang terhormat Saudara Kepala BKN beserta jajarannya;

Yang terhormat Pimpinan Komisi II;

Para Anggota Komisi II yang berbahagia;

Hadirin sekalian.

Menteri. Jadi di atas balkon saya kira, apa guru honorer atau apa? honorer, ya duduk saja dulu, kalian boleh mendengar, ya Bapak/Ibu boleh mendengar yang di atas tetapi tidak boleh bicara protes-protes.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Kerja Komisi II dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang pengawasan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai laporan sekretariat, rapat kerja pada hari ini, daftar hadir telah ditandatangani 28 orang dari seluruh fraksi yang telah hadir dari 50 orang Anggota. Dengan demikian sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), perkenankan kami membuka Rapat Kerja ini dan dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim* dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.40 WIB)

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan dari Komisi II DPR RI pada acara siang hari ini dan kalau sabda nabi begitu, tamu itu harus diutamakan begitu, tamu harus diutamakan, tetapi karena kalau bertamu ini tempat ini adalah ruang Komisi II, ya Pimpinan Komisi II telah lengkap, hadir pada kesempatan ini. Sebelum nanti Pak Menteri memperkenalkan jajarannya, saya kira Komisi II, jadi yang dalam posisi di tempat ini dulu, baru nanti tamu kami sampaikan untuk memperkenalkan. Saya sendiri Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Partai Golkar. Kalau Pak Menterinya agak tunduk-tunduk begitu kasih kode kepada saya, jadi ya punya sejarah tersendiri, punya sekolah sama-sama, asal muasal juga sama-sama. Oleh karena itu, selaku Pimpinan Komisi II menyampaikan terima kasih. Di sebelah kanan saya, Saudara Reza Patria dari Fraksi Gerindra. Di sebelah kanan, Saudara Mustafa Kamal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Di sebelah kiri saya adalah Saudara Wahidin Khalid dari Fraksi Partai Demokrat dan di sebelah kiri adalah Saudara Lukman Eddy dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Oleh karenanya, ini semua juga adalah mandat birokrat dan Anggota nanti akan memperkenalkan sekaligus dari Fraksi-fraksi yang hadir pada kesempatan ini.

Untuk mempersingkat waktu, kami mulai habis dari kanan nanti baru ke kiri.

Kami mulai dari Pak Azikin. Ini juga mantan bupati 10 tahun.

Kami persilakan.

F-GERINDRA (DR. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi II yang kami hormati; Bapak Menteri dan rombongan yang sama kami hormati.

Saya Azikin Solthan dari Dapil I Sulawesi Selatan, Makassar dan sekitar, Fraksi Partai Gerindra A-389.

Terima kasih.

F-GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota; Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Saya Bambang Riyanto, Nomor Anggota A-357, dari Fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, Sukowarjo, Solo, Klaten, Boyolali.

Terima kasih.

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri dan jajarannya yang saya hormati,

Nama saya Lutfi, Nomor Anggota A-34, dari Fraksi Partai Nasdem. Sebelum saya duduk disini, saya banyak bersentuhan dengan Kemenpan dan BKN, karena selama 5 tahun saya Anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, dipimpin oleh Pak Mardiasmo.

Terima kasih Pak.

F-PG (Drs. A. H. MUJIB ROHMAT):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Nama saya Mujib Rohmat, kayaknya juga agak kenal sama Pak Menteri ini karena sekolahnya yang sama dan 1 kelompok yang sama dengan Pak Rambe tadi. Selamat bekerja dan moga-moga sukses dengan baik dan berkah.

Terima kasih.

Dari Fraksi Partai Golongan Karya, Dapil I Jawa Tengah, Semarang, Kendal, Salatiga, dan Ungaran.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

F-PG (Drs. H. DADANG MUCHTAR):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Langsung saja, tidak basa-basi.

Nama saya, Dadang Muchtar dari Fraksi Golkar dengan Nomor A-263, asal Dapil VII Jawa Barat, Karawang, Purwakarta, Bekasi.

Terima kasih.

F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, MBA):

Terima kasih Ketua.

Nama Endro Hermono, Nomor Anggota A-369, dari Fraksi Gerindra, Dapil Jawa Timur VI yang meliputi Blitar, Kediri, Teluk Agung.

Terima kasih.

Salam Indonesia Raya.

F-PD (Ir. FANDI UTOMO):

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati;
Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati.**

Saya Fandi Utomo dari Fraksi Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Surabaya, Sidoarjo.

Terima kasih.

Terima kasih.

Pimpinan dan Pak Menteri dan beserta jajarannya.

Nama saya Libert Ibo dari Fraksi Partai Demokrat, Dapil Papua.
Terima kasih.

F-PG (Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Hj. Enny Anggraeny Anwar, Fraksi Golkar, Dapil Sulawesi Barat, A-319.
Terima kasih.

F-GERINDRA (SUASANA DACHI, SH):

Selamat siang buat seluruh yang hadir.

Nama saya Suasana Dachi, Fraksi Gerindra, Dapil Sumut II, Nomor Anggota A-328.
Terima kasih.

F-PKB (Dr. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dr. Zainul Arifin Noor dari Kalimantan Selatan, dari Fraksi PKB, A-80.

F-PPP (KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Asep Ahmad Maoshul Affandy, Anggota 520, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dapil Jawa Barat X, meliputi Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Wassalam.

F-GERINDRA (H. SUBARNA, SE., M.Si):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan beserta Pak Menteri yang saya hormati.

Perkenalkan nama saya Subarna, dari Dapil Jabar XI, meliputi Kabupaten Tasik, Kota Tasik dan Kabupaten Garut. Mungkin itu saja.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

F-PD (SAAN MUSTOFA, M.Si):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebelah kiri, kami persilakan mulai dari Pak Zul.

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan, Pak Menteri.

Nama H. Zulkifli Anwar, dari Fraksi Demokrat, Nomor Anggota 409, Daerah Pemilihan Lampung I.

Terima kasih.

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Agung Widyantoro, A-279, membawa mandat dari rekan-rekan honorer K2 yang ingin menjadi PNS.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dari Partai Beringin Sakti atau Partai Golkar.

F-HANURA (FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang Pak Menteri dan seluruh jajaran Pejabat Esselon I kepada Menpan.

Kebetulan Ketua saya dari Menpan juga Ketua, 11 tahun di Menpan. Jadi saya ketemu dengan ... saya sendiri dan saya Frans Agung Mula Putra, dari Dapil Lampung I, Nomor Anggota A-549, tentunya akan membawa perjuangan dari honorer K2.

Terima kasih.

F-HANURA (RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Rufinus Hutauruk, dari Fraksi Hanura, Nomor Anggota A-546, dari Dapil II Sumatera Utara.

Terima kasih.

F-PAN (AMRAN, SE):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Komisi II dan Menteri beserta seluruh jajaran.

Nama saya Amran, Nomor Anggota 503 dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III sama dengan Pak Lutfi meliputi 9 kabupaten dan kota, agak banyak juga

itu mungkin akan dibicarakan disini adalah persoalan tenaga perbincangan waktu saya berada di Komisi VIII karena banyak juga persoalan tenaga honorer di Kementerian Agama. Saya kira begitu Pimpinan.

***Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Tagore Abubakar, dari Daerah Pemilihan Dapil II Aceh, dari Gayo sampai ke Tamiang, dari PDI Perjuangan, tentu berjuang untuk semua termasuk para honorer. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Bapak Menteri beserta jajarannya.

Nama saya Diah Pitaloka, saya dari Dapil Jabar III, Bogor, Kota Bogor dan Cianjur dari Fraksi PDI Perjuangan, A-154. Ya saya setuju dengan teman-teman yang lain atau seluruh yang hadir disini bahwa honorer itu memang menjadi persoalan yang banyak sekali ditemukan ketika kita reses kemarin. Jadi mungkin akan jadi diskusi yang menarik hari ini. Terima kasih.

F-PPP (Dr. H. Mz. AMIRUL TAMIM, M.Si):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Amirul Tamim, dari Dapil Sulawesi Tenggara, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Terima kasih.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Ya, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri.

Nama saya Yandri Susanto, saya periode yang lalu disini juga, Dapil Banten II Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dan saya tidak mau pindah dari Komisi II karena masih mau berjuang sama-sama tenaga honorer yang waktu periode lalu kita sudah sepakat bahwa K2 itu harus tuntas sebenarnya dan itu adalah keputusan dengan Komisi II. Nah makanya saya sekali lagi tidak akan pindah dari Komisi II kalau K2 belum selesai, dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Sudah habis ya?
Ada yang belum?
Oh iya, kami persilakan.

F-PG (TABRANI MAAMUN):

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Bapak Menteri beserta jajaran;
Yang terhormat Pimpinan, Ketua Komisi II.**

Nama saya Tabrani, dari Dapil Riau I, Nomor Anggota 241.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Habis ya?
Terima kasih para Anggota yang terhormat dari Komisi II.
Kami persilakan Saudara Menteri atau sekaligus nanti dengan BKN terserah, kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Sebenarnya kalau yang sudah ada duduk disini ya tetapi disini, pada umumnya masih belum akrab, biar lebih akrab.
Kami persilakan dengan hormat.

MENTERI PANRB (Dr. YUDDY CHISNANDI):

Terima kasih.

**Ketua Komisi II DPR RI Pak Rambe Kamarul Zaman, senior saya dari tempat kawacanda di muka yang sama bersama Pak Mujib dan Rekan-rekan lainnya;
Para Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat.**

Izinkan saya memperkenalkan jajaran saya.
Saya sendiri Yudi Krisnandi, Pembantu Presiden yang diberikan tugas mengurus aparaturnegara. Di sebelah kiri saya, Bapak Sekretaris Menteri Pak Dwi Atmadji. Di sebelah kiri Pak Dwi, Ibu Rini Widiatini Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, di sebelahnya lagi Ibu Mirawati Deputi Pelayanan Publik, disebelahnya lagi adalah Staf Ahli Ibu Sri Rahma, disebelahnya Pak Muhammad Yusuf Atte Deputi Pengawasan Reformasi Birokrasi. Di sebelah kanan saya, Pak Setiawan Deputi SDM dan Aparatur. Sebelah kanannya, Pak Eko Kepala BKN. Di sebelahnya Pak Eko Sestama BKN, di sebelah kanan Pak Papa Irawadi dari Tim Ahli dan rekan-rekan lain yang hadir disini.

Pertama kami memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi kepada DPR, kehadiran kami disini dalam rangka menjalankan tugas konstitusional, memenuhi undangan DPR untuk menyampaikan progress dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana diajukan oleh Anggota Dewan yang terhormat.

Izinkanlah kami untuk langsung secara singkat karena secara paparan tertulis sudah kami bagikan dan kami yakin berbagai isu dan persoalan-persoalan yang terkait dengan tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak-bapak dan Ibu Anggota yang terhormat sudah mengikuti dan mengetahui lebih jauh.

Yang pertama, tentu pijakan langkah dari penyusunan road map kementerian didasarkan pada agenda prioritas pembangunan RPJPMN 2015-2019 dimana nawacita sebagai pedoman 9 agenda prioritas pembangunan. Salah satunya di dalam rangka memantapkan pendayagunaan aparaturnegara, nawacita yang kedua membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Dari sinilah titik pangkal implementasi revolusi mental, reformasi birokrasi aparaturnegara sipil negara dimulai. Tujuan dan sasaran Kementerian PAN RB Tahun 2015-2016:

1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;

4. Terwujudnya pelayanan prima pada masyarakat;
5. Terwujudnya Kementerian yang berintegritas, profesional, dan berkinerja tinggi.

Dan tentu tujuan-tujuan dan sasaran kementerian ini tidak lepas juga dari peran Komisi II yang telah berhasil merumuskan, membahas dan mengesahkan, serta sudah dilaksanakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil.

Sasarannya secara umum bisa dilihat.

1. Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran;
2. Terwujudnya tata laksana bisnis, proses pemerintahan yang efektif dan efisien, penerapan e-government, peningkatan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional.

Sasarannya adalah kita menginginkan ke depan adanya sebuah sistem kepegawaian nasional yang kompetitif di masa yang akan datang dengan pencapaian sebuah visi bahwa negara kita akan menjadi negara dengan penyelenggaraan pemerintahan berkelas dunia dimana aparatur sipil negaranya adalah produk-produk yang berkualitas, berintegritas dan profesional. Adapun program kerja Kementerian PAN RB 2015-2016 memiliki 3 fokus program utama.

1. Program Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi;
2. Program Dukungan Manajemen, Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Kementerian;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN RB dimana sasarannya adalah pelaksanaan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek, diantaranya:
 - 1) Kelembagaan tata laksana, SDM Aparatur, Pengawasan Akuntabilitas Aparatur, serta pelayanan publik.
 - 2) Pelaksanaan tugas internal, antara lain pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, operasional perkantoran, pembiaran sarana dan prasarana perkantoran, administrasi keuangan, perencanaan dan penganggaran, kehumasan pengawasan internal dan dukungan lainnya.
 - 3) Peningkatan pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana dalam upaya pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Di bagian berikutnya, kita juga sangat memperhatikan di dalam melaksanakan reformasi birokrasi kita memperhatikan betul apa yang menjadi persepsi masyarakat terhadap reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi memiliki 3 sasaran. Yang pertama perubahan *mindset*, yang kedua adalah penataan struktur birokrasi organisasi pemerintahan dan yang ketiga adalah pemantapan budaya kerja aparatur sipil negara yang lebih berdedikasi dan lebih memiliki disiplin yang ... Indeks persepsi masyarakat terhadap reformasi birokrasi mengalami peningkatan yang semula 5,7 pada Bulan Juni 2014 menjadi 6,21. Artinya, program-program reformasi birokrasi yang digagas pada pemerintahan sebelumnya mengalami trend yang meningkat. Pengungkit terbesar peningkatan indeks persepsi tersebut adalah variable seleksi CPNS dan efisien, masing-masing meningkat 1,33 poin dan 1,14 poin. Artinya, proses seleksi yang dilakukan itu semakin memberikan harapan dan kepercayaan publik karena akuntabilitas dan transparansi.

Karena itu kampanye revolusi mental birokrasi menjadi sangat penting dan relevan khususnya untuk:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas seleksi CPNS dan pelaksanaan efisiensi birokrasi serta variable lainnya;
2. Memperbaiki dan meningkat etika disiplin PNS pada umumnya.

Lalu kemudian yang terkait dengan reformasi manajemen aparatur sipil negara. Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara ini didasarkan pada berbagai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dimana sebelum adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, penataan birokrasi rumit dan membutuhkan waktu lama, tidak transparan, lalu kemudian tidak ada kejelasan mutasi, dan promosi, tidak objektif dan tidak adanya ketegasan sanksi. Nah di dalam implementasi Undang-Undang No. 5/2014 diharapkan analisa jabatan dan analisis beban kerja dengan reformasi ini bisa lebih sesuai di dalam penetapan kebutuhan sistem registrasi online, seleksi menggunakan komputer system test, kualifikasi kinerja yang berkompeten, recruitment yang lebih terbuka, dan hak dari setiap aparatur sipil negara untuk mendapatkan *capacity building* melalui kegiatan pendidikan dan latihan. Penilaian kinerja akan lebih akuntabel dan transparan, peningkatan disiplin akan lebih ketat dan lebih bertanggung jawab.

Manajemen akan terus kita lakukan dengan mensosialisasikan dan juga pengawasan yang lebih sistematis baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Adapun progress dari Rancangan Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, di dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan ada 19 Peraturan Pemerintah. Namun dari 19 Peraturan Pemerintah tersebut, yang menjadi hal-hal yang bisa disatukan, kemudian kami melihat ada 6 area RPP. Yang pertama RPP Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang kedua RPP Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang ketiga RPP Penilaian Kinerja dan Disiplin, keempat Penggajian dan Tunjangan, kelima Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, Keenam Pegawai Aparatur Sipil Negara. Insya Allah keenam RPP ini akan dapat kami selesaikan sebelum Bulan Maret berakhir dan bisa segera difungsionalisasikan.

Hal yang terkait dengan moratorium CPNS. Pertimbangan-pertimbangan dilakukan moratorium aparatur sipil negara di awal pemerintahan ini, yang pertama kita ingin melihat secara cermat berapa sebenarnya formasi kepegawaian yang ada, kita ingin adanya keseimbangan antara tempat-tempat atau instansi atau daerah dan wilayah yang berlebihan aparatur sipil negara atau PNS-nya terhadap daerah-daerah wilayah atau organisasi pemerintahan lainnya yang memiliki kekurangan. Moratorium penerimaan ASN dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna mengoptimalkan kinerja aparatur dan efisien anggaran.

Salah satu beberapa pertimbangan tentang moratorium, pertama tentu kebutuhan tentang pengurangan pegawai, saat ini tidak kurang dari 4.375.009 orang dan di dalam penghitungan analisis kerja beban dan jabatan, jumlah ini memang cukup besar dan menyita belanja pegawai yang tidak sedikit, tidak kurang dari 41% dari total anggaran pendapatan belanja negara terserap untuk belanja pegawai dan sebagaimana Bapak-bapak dan Ibu Anggota DPR yang terhormat mengetahui, bahwa setiap pengadaan 1 orang Pegawai Pemerintah tentu tidak lepas dari peningkatan belanja barang dan modal untuk pengadaan dan sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian Anggota DPR Komisi II yang terhormat mengetahui bahwa total belanja barang, belanja modal dan belanja pegawai sudah mencapai lebih dari 81% sehingga tersisa ruang fiskal yang cukup sempit 19% untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program-program pembangunan lainnya. Kami juga mempertimbangkan adanya distribusi pegawai yang tidak merata, kami juga mencermati belanja aparatur yang terus meningkat dan promosi jabatan fungsional umum yang begitu tinggi.

Dengan demikian ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dari Pemerintah:

1. Secara internasional ada 3 pola di dalam moratorium ini, yaitu zero growth di dalam mengisi kepegawaian, lalu kemudian bisa minus growth, dan juga kita tetap melakukan pertumbuhan dengan mengadakan rekrutmen pada jabatan fungsional tertentu atau terbatas yang benar-benar dibutuhkan di dalam proses penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan pada masyarakat. Tentu di dalam melakukan moratorium ini, kami tidak melakukan sapu bersih dan pukul rata, khusus kepada guru dan tenaga medis ini tidak dilakukan moratorium, karena kami menyadari bahwa di berbagai macam daerah masih sangat dibutuhkan guru dan juga sangat butuh tenaga medis. Lalu kemudian untuk jabatan-jabatan fungsional lainnya juga dikecualikan yaitu jabatan-jabatan fungsional yang betul-betul diperlukan untuk peningkatan pembangunan kesejahteraan masyarakat seperti Penyuluh Pertanian misalnya, atau Ahli Tata Kota atau Planologi, Ahli Irigasi maupun keahlian-keahlian lain yang menjadi kebutuhan dari penyelenggaraan pemerintahan setempat.
2. Moratorium ini juga dengan tujuan penurunan jumlah pegawai, lalu kemudian kita juga memperhatikan batas usia pensiun dan juga kita memperhatikan seberapa besar peningkatan kebutuhan pelayanan publik. Jadi kami melakukan ini semua dengan kehati-hatian, dengan telaahan yang mendalam, dan juga dengan sasaran penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan produktif di masa yang akan datang.

Mengenai penanganan tenaga honorer, dasar hukum dari penanganan tenaga honorer adalah Peraturan Pemerintah No. 48/2005, Peraturan Pemerintah 43/2007, dan Peraturan Pemerintah 56/2012. Tenaga honorer memiliki kriteria:

1. Dibiayai dari APBN atau APBD yang tanpa tes. Nah ini jumlahnya cukup besar, antara Tahun 2005 sampai 2009 atau Tenaga Honorer K1 ini kita sudah melakukan pengadaan tanpa tes yang hasilnya Bapak dan Ibu sekalian bisa dilihat sendiri, itu jumlahnya sudah mencapai 893.249.
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah dengan ketentuan yang kita sama tahu bahwa masa kerja paling sedikit 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan masih bekerja secara terus menerus, usia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh dari 46 tahun. Ketentuan-ketentuannya sudah sangat jelas dan program K1 ini menurut ketentuan PP 48 dan 43 dimana Komisi

n dan juga memberikan frame work kepada seluruh instansi an baik di tingkat pusat maupun daerah untuk tidak melakukan

Sesungguhnya sebagaimana Anggota Dewan yang terhormat, bahwa tenaga honorer ini bukan merupakan program dari Pemerintah Pusat. Kita mengetahui bahwa keberadaan honorer itu merupakan suatu proses pengadaan dan kebijakan pada tingkat lokal dan marak dilakukan di era reformasi ketika pemilihan langsung gubernur, bupati, walikota dilaksanakan. Jadi Pemerintah Pusat kemudian mengambil alih tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dan kemudian menyelenggarakan program K1 sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Namun K1 ini ternyata tidak selesai dan kemudian keluarlah PP No. 56/2012 Ketentuan K2. Di dalam Ketentuan K2 juga sudah disebutkan bahwa pembuatan soal dan pengelolaan hasil ujian dilakukan oleh konsorsium perguruan tinggi negeri, ada proses seleksi dan kelulusan, ada passing grade, ada batas usia, dan juga ada masa retensi Tahun Anggaran 2014 harus sudah selesai, dan dari proses itu semua, maka sampai dengan akhir Tahun 2014 seluruh proses seleksi K2 yang terverifikasi sebanyak kurang lebih 625 ribu sudah diselesaikan dan dari angka tersebut sekitar 198 ribu dikatakan lulus dan sisanya kurang lebih 450-an ribu tidak lulus dalam proses seleksi tersebut.

Ini tabel-tabelnya dan angka-angkanya sudah ada pada laporan Bapak dan Ibu sekalian.

Kalau dilihat dari aturan-aturan yang menjadi pedoman Pemerintah, sebenarnya program K2 ini bisa dikatakan sudah selesai. Namun kami juga menyadari bahwa ada proses sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah No. 56 yang kurang terkomunikasikan dengan baik dari Pemerintah sendiri. Seharusnya tidak ada klausul PP 56 yang sama dengan pada program K1. Di PP 56 itu tidak ada lagi pengangkatan secara otomatis, yang ada adalah verifikasi, pendataan administratif untuk bisa diikutsertakan dalam proses seleksi itu tentu ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Kami juga menyadari masih ada persoalan-persoalan dimana K2 yang diikuti seleksi dan lulus tersebut juga ada data-data administratif yang tidak sesuai dengan seharusnya atau dikatakan dengan K2 yang bodong dan jumlahnya cukup besar.

Dari temuan-temuan awal, kami yang sudah mengeluarkan yang disebut dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari para kepala daerah untuk mempertanggungjawabkan sekiranya di dalam proses pemberkasan dan proses pengangkatan CPNS tersebut ditemukan adanya penyimpangan atau adanya tuntutan, maka Kepala Daerah yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas proses yang sudah berlangsung.

Kami bisa laporkan bahwa seluruh amanat dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 tentang Pemrosesan dan Penyelesaian dari K2 secara legal atau secara nomenklatur yuridisnya bisa dikatakan sudah kami laksanakan, Pemerintah sudah melaksanakan. Ada 2 hal yang menjadi pertimbangan mengapa dalam perspektif mengenai K2 ini bisa dikatakan sudah kami kerjakan dan kami anggap selesai. Yang pertama adalah batas retensi waktunya yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah dan yang kedua proses daripada seleksi yang sudah tuntas seluruhnya kecuali untuk wilayah Papua dan Papua Barat mengingat masih ada proses administrasi dari pemberkasan K1 sebelumnya yang sampai sekarang belum selesai dan itu sementara kami pending.

Kami laporkan juga sampai dengan saat ini Pemerintah telah mengangkat tenaga honorer sejak Tahun 2005 sebanyak 1.136.663 atau jumlahnya 26,06% dari total pegawai negeri sipil nasional, sehingga pegawai negeri sipil lainnya yang masuk lewat jalur penerimaan CPNS hanya sebesar kurang lebih 19%, kurang dari 20%.

Yang terkait dengan revolusi mental aparatur negara, ada beberapa asumsi-asumsi perubahan, mindset dan kulturset aparatur negara yang sebelumnya dilayani menjadi melayani, jadi kita ingin mengubah cara pandang, pola perilaku dan sikap keseluruhan aparatur sipil negara, kita ingin memperbaiki pelayanan publik menjadi lebih baik lagi dan kita ingin bahwa seluruh aparatur sipil negara ini benar-benar birokrat yang lebih dekat dan senantiasa berada di tengah rakyat. Kalau sebelumnya kita senantiasa dilayani, sekarang harus melayani. Kalau sebelumnya berorientasi pada proses, harus berorientasi pada outcome yang tadinya pasif menjadi responsif, yang ingin kompeten menjadi kompeten, pelayanan yang rumit menjadi sederhana, yang koruptif menjadi bersih, ego sektoral menjadi kerja sama lintas sektoral atau kolaborasi. Kita mengharapkan ke depan tentu aparatur sipil negara ini memiliki kualitas yang lebih baik lagi, memiliki kemampuan profesional di dalam melakukan pelayanan yang lebih prima dan juga integritas. Oleh karenanya, serangkaian aturan-aturan kami buat untuk mengembalikan kedisiplinan mereka untuk lebih efisien di dalam melakukan penggunaan anggaran dan disiplin terhadap aturan-aturan yang ada.

Ada 5 hal yang menjadi area daripada pelaksanaan perubahan mindset ini.

-aturan yang mengembalikan kedisiplinan aparatur sipil negara;
seh seluruh Pimpinan dari aparatur sipil negara;

3. Pengawasan yang ditingkatkan secara lintas sektoral;
4. Reward and punishment yang diperjelas; dan
5. Kesejahteraan yang semakin baik dari aparatur sipil negara.

Dengan demikian kita akan berorientasi pada hasil yang lebih efisien, ada pengembangan nilai-nilai unggul dan budaya kerja melalui sharing, keteladanan di dalam kepemimpinan secara luas dan penguatan local wisdom atau nilai kearifan lokal. Hal yang lain adalah kelembagaan KSN, KSN sudah dilantik, sudah diselesaikan, dilantik oleh Presiden langsung, dan nomenklatur keorganisasiannya sudah disusun, saat ini KSN sudah bekerja, sekretariatnya berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sambil menunggu fasilitas kesekretariatan yang lebih memadai. Saat ini KSN sudah membentuk kesekretariatan dan tengah menyusun formasi organisasinya yang sudah kami setuju dari Pemerintah.

Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagaimana pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah diajukan oleh Komisi II DPR RI yang terhormat.

Dari kami mungkin itu dulu.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak/Ibu dan Saudara sekalian,

Terima kasih Saudara Menteri.
Selanjutnya, saya kira perlu dari BKN.
Pak Eko kami persilakan.

SESTAMA BKN (EKO):

Terima kasih.

**Bapak Menteri yang kami hormati;
Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.**

Izinkan kami melaporkan bahwa bahan yang kami siapkan dengan angka-angka dan penyelesaian tenaga honorer sudah sekaligus termuat dalam apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Untuk itu, kami tidak akan memaparkan paparan dari BKN. Namun demikian kami siap memberikan jawaban apabila nanti ada pendalaman lebih lanjut.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Komisi Aparatur Sipil Negara Pak Menteri tidak ikut serta?

SESTAMA BKN (EKO):

Tidak Pak, tidak dalam format undangannya. Kalau diundang mungkin mereka datang.

KETUA RAPAT:

Baik.

Kita akan dalam. Tadi dijelaskan saya kira yang pertama oleh Saudara Menteri hal-hal yang menyangkut rencana strategis kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam susunan kabinet kerja 2014-2019. Saya kira disampaikan dan itu yang dimulai dari tahapan

udah disajikan tadi termasuk agenda prioritas pembangunan, kira nanti juga dijelaskan tadi tentang progress pembentukan komisi aparatur sipil negara yang merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh komisi ini dan dijelaskan lagi tadi soal kebijakan tenaga honorer, ini sepanjang nanti kita membahasnya kalau dengan DPR sudah mulai dari Tahun 2007, 2008 dan seterusnya akan hal tersebut, dan juga tadi disampaikan tentang implementasi dari Undang-Undang No. 5 tentang Aparatur Sipil Negara. Ini juga berikut kira-kira Peraturan Pemerintah yang akan dan sudah dipersiapkan, tetapi kalau dari catatan kami di Komisi II bahwa yang harus dipersiapkan itu ya memang mungkin lebih dari situ termasuk Peraturan Presiden yang harus diselesaikan.

Berikut Bapak/Ibu dan Saudara sekalian adalah terminologi yang menyangkut revolusi mental itu ya ini dijabarkan dalam revolusi mental di birokrasi. Inikan ada pandangan ini. Kalau dari masyarakat, melihat birokrasi itu yang dari kaedah-kaedah ya lambat urusannya, tidak dilayani, tetapi kalau sebenarnya dari pengertian yang lengkap juga secara akademik, saya kira birokrasi ini harus dimanana pun ada dalam suatu pemerintahan, apalagi pemerintahan yang sistem presidensial.

Oleh karena itu, nanti kita akan dalam langkah-langkah yang sudah diambil yang menyangkut misalnya kebijakan yang kaitannya dengan revolusi mental untuk di kalangan birokrasi. Terus Saudara ini banyak bupati, saya terus terang kalau turun ke daerah pemilihan, Anggota DPR sudah 23 tahun begitu, ini tahun ke-24. Jadi kalau turun ke bawah itu jam 2 kantor bupati itu sudah tutup begitu, jam 2 di daerah pemilihan saya tentunya. Jam 2 sudah kosong. Oleh karenanya, ini juga termasuk menjadi catatan, sebab DPR hanya sekedar rapat kita begitu, juga harus tuntas, termasuk kita harus ada kebijakan mencari jalan keluar tentang tenaga honorer ini. Ini masalah adalah masalah bangsa kita, tidak ada saya kira ada masalah kita anggap ini urusan karena sudah direkrutmen oleh Pemerintah Daerah, terus penyelesaiannya kok timbul soalnya begini, karena negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI itu adalah Indonesia dibagi provinsi-provinsi, provinsi-provinsi itu dibagi itu Pasal 14 Undang-Undang Dasar. Kabupaten/Kota, Undang-Undang Desa kita menyatakan kabupaten/kota dibagi kecamatan, kelurahan dan desa. Ini jadi terkait yang menyangkut aparatur sampai ke bawah.

Oleh karena itu, kita sudah memahami semua Saudara-Saudara surat edaran Saudara Menteri juga kita pahami tentang efisien itu. Jadi saya tidak tahu ini ya atau sudah tidak ada lagi kue-kue yang, tetapi kacang rebus, tetapi di daerah pak menteri ini dipersiapkan juga, kenapa tidak boleh rapat di hotel, ya mungkin aparatur dari daerah ini ya kalau ke jakarta harus menginap ke hotel sekaligus dan juga hal-hal yang menyangkut yang lain bisa kita pertanyakan di dalam rapat ini dan kita bersepakat dulu ini soal waktu. Jam 17.15 WIB untuk kita akhiri ya, selesai ya? Baik.

Jam 17.15 WIB begitu.

Kami persilakan yang ingin mendalami.

Saya kira kalau banyak begini, kita urut saja, per fraksi saja, satu-satu. Jadi kita mulai dari PDIP. PDIP dulu.

Ya kami persilakan.

F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri yang kami hormati,

Dari paparan tadi.

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Interupsi sebentar Pimpinan.

Maaf, mau nanya dulu. Kalau per fraksi, kami ada kapoksi.

Boleh izin nanya sebentar sekali lewat.

Ya kapoksi saja ya, atau dari Demokrat ingin mewakili, maaf Pimpinan.

Ini nanya soal izin, Kapoksi saja ya?

KETUA RAPAT:

Ya pokoknya diatur saja.

Jangan teguran Pimpinan.
Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan dari PDIP Pak Tagore.

F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):

Tagore dari PDI Perjuangan.

Kami apresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri luar biasa. Mungkin ini suatu hal yang sangat berat Pak, karena perjalanan kita begitu panjang, KKN begitu, korupsi dimana-mana. Dari agenda prioritas pembangunan RPJM 2015-2019 juga sudah kita ketahui cukup baik. Mungkin kalau kita bersama-sama ini akan tercapai Pak.

Kemudian dari perjalanan kami Pak, kami reses ke beberapa tempat termasuk Sulawesi, Aceh dan lain-lain. Pak Menteri, pekerjaan ini sangat keras, sangat berat mungkin dengan kekuatan yang ada di Menpan dan BKN itu tidak mampu kalau kita tidak sama-sama melaksanakan. Sebagai contoh, Ortala ini Pak, Organisasi dan Ketatalaksanaan tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan ini sudah puluhan tahun terjadi, apakah mungkin dalam waktu yang 5 tahun ini kalau masih tetap nanti Presidennya PDI Perjuangan, Bapak tetap Menteri ini 10 tahun, ini mungkin bisa, tetapi kalau 5 tahun ini mungkin sebagian saja. Seperti misalnya Pak K2. K2 itu yang berhak, mendapatkan prioritas lewat K2 ini tidak dapat Pak. Malah ratusan orang yang tidak berhak untuk itu, baru 2 tahun langsung disulap, ini yang diangkat Pak, SK-nya keluar, malah K2 yang seperti yang datang ini saya yakin yang benar-benar ini. Kalaulah terjadi Pak, ini kita stop, tidak ada lagi keluar aturan dan lain-lain, ini mengorbankan banyak orang Pak, seperti yang Bapak paparkan tadi memang Bapak sudah temukan semua, bahwa ada yang tidak berhak, sudah ditindaklanjuti tetapi saya lihat belum Pak, tindak lanjut tetapi belum dilakukan tindakan tegas terhadap orang yang tidak berhak ini. Kemudian celaknya lagi Pak, di daerah itu Bupati masih menerima honorer-honorer yang sudah dilarang. Di beberapa tempat, mungkin di semua tempat, malah honor yang diberikan kepada honorer yang lama itu dibagi 2 supaya dapat untuk honorer yang baru. Ada suatu tempat Pak yang honorinya cuman 200 ribu per bulan tetapi harus datang harus datang disiplin, ikut apel dan lain-lain. Ini terjadi luar biasa, ini masih ada dimana-mana. Kemudian penempatan orang kalau Pimpinan tadi menyatakan ini juga yang dicontohkan ... tempatkan seorang sesuai dengan keahlian, kalau tidak kehancurannya. Ini terjadi hampir di semua tempat, disebabkan oleh pertama mungkin rekrut orang yang dibutuhkan di bidang tertentu tidak dilakukan sehingga punya kesempatan merekrut yang lain. Saya pernah temukan Pak camat dari guru agama, malah yang tamat STPDN dianggurkan, nganggur dia Pak. Kemudian ada lagi yang harus Saudaranya Bupati Kepala Daerah, padahal kita punya bupper zakat, bupper zakat tidak berfungsi sama sekali. Jadi duluan dilantik pejabatnya, baru bupper zakatnya bekerja Pak supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan kita berpegang kepada Peraturan Pegawai Negeri, jenjang karir pegawai negeri yang terjamin. Tentu berdasarkan kinerja Pak Menteri, bukan berdasarkan kedekatan dengan DPR, dengan Menteri dan dengan Bupati. Ini yang harus kita revolusi mental ini dan ini terjadi Pak perekrutan K2 itu sebelum revolusi mental kita jalan, ini masih bobrok betul, dimana-mana pun seperti itu Pak Menteri. Jadi honorer masih diterima, ada honorer yang 200 ribu dia tidak peduli UMR, tidak peduli kalau pegawai, mungkin Tim Sukses mendesak anak saya harus jadi pegawai, ini diterima Pak, ratusan, 400-an, 500-an hampir ribuan, sehingga hak-hak honorer yang lalu itu dipotong. Ini mungkin segera dan kami bisa laporkan semua yang kami sampaikan ini, penempatan orang yang tidak sesuai, masa guru agama menjadi camat, dia mengerti tidak masalah pasal pemerintahan. Kemudian kalau guru sekolah itu menjadi camat, ada beberapa hal yang dia langgar. Pertama kalaulah guru itu sudah jadi menempati di tempat struktural berarti guru sekolah di tempat itu sudah berlebih, maka daerah itu tidak dimungkinkan lagi untuk merekrut guru sekolah Pak. Ini mungkin kalau kita tegas, revolusi mental Pak Menteri tegas nanti ini kita tindak, ditindaklah Pak Menteri, diajar disiplin.

Jadi 3 hal tadi di bidang kepegawaian. Kalau kami melihat agenda prioritas pembangunan RPJM Bapak ini luar biasa Pak. Kami kayaknya mau mati bersama Bapak untuk memperjuangkan ini, tetapi kita harus konsisten dengan ini. Kalau ada misalnya Pak di jajaran Bapak yang melanggar ini, Bapak selesaikan, direformasi dulu di jajaran kementerian Bapak, baru kita laksanakan ke jajaran bawah.

awat Pak Pimpinan. Bapak bedakanlah masalah tempat lain
amnya lama Pak, berontak minta merdekanya lama, sehingga
penggunaan ditutup, sekoran-sekoran ditutup, kemudian yang honorer tidak bisa lanjut. Jadi ini kiranya
dapat diprioritaskan. Diprioritaskan dalam arti kata persyaratannya itu, tidak sama dengan persyaratan di
tempat-tempat lain yang aman, karena sebenarnya keamanan di Aceh itu adalah tanggung jawab
Pemerintah Pusat, bukan kami ingatkan Pemerintah Pusat tidak bertanggung jawab Pak tetapi banyak
yang meninggal, sekolah dibakar dan lain-lain oleh GAM, sekolah dibakar oleh GAM, bukan tentara itu
pasti, oleh GAM kemudian kesehatan, puskesmas dan lain-lain tidak berfungsi sampai Kejaksaan tidak
berfungsi waktu itu, sampai terpaksa waktu itu saya buat 3.000 senjata rakitan untuk mempertahankan
NKRI Pak. Saya Ketuanya, saya Ketua Kota Aceh untuk Republik. Jadi tatkala saya minta tolong Pak
Menteri, Pak Menteri lebih dulukan saya ketimbang mantan-mantan pemberontak, saya adalah orang
NKRI asli Pak, tidak pernah berubah, darah saya merah, tulang saya putih, dan ini tidak berubah. Jangan
Bapak prioritaskan nanti orang-orang pemberontak untuk Bapak dahulukan, itu perang lagi kita Pak,
perang Jilid II di Pulau Jawa, bukan lagi di Aceh. Jadi Aceh Bapak prioritaskanlah termasuk Komisi II saya
berharap seperti itu. Yang saya katakan ini fakta, banyak guru yang meninggal waktu itu, dibunuh, karena
ini pekerjaan yahudi di Aceh itu. Jadi barangkali Pak, saya harus sampaikan ini, semua harus
disampaikan terang benderang dengan data yang valid, sehingga Pak Menteri dapat menyelesaikan
dengan benar, tetapi kalau saya sampaikan kabur-kabur nanti tidak seperti yang sebenarnya,
penyelesaiannya juga akan sulit. Jadi data yang valid akan saya berikan, karena disana juga di Aceh itu
banyak yang Anggota DPR-nya juga yang masih, dari mulai paket a, paket b, paket c, itu yang jadi
Anggota Dewan disana, sehingga kita harus patuh untuk memperjuangkan kesejahteraan disana.

Jadi ini terima kasih Pimpinan telah memberikan kesempatan kepada PDI Perjuangan. Itulah PDI
Perjuangan yang merah putih itu Pak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saudara-Saudara,

Ini Pak Tagore adalah yang dihibahkan oleh partai kami ke PDIP, sebab yang lantik saya sendiri
dalam rangka memperjuangkan daerah pemilih tadi.

Kita lanjutkan Partai Golkar.

F-PG (Drs. H. DADANG MUCHTAR):

Izin.

Terima kasih.

Saya mewakili yang pertama Partai Golkar, tetapi saya akan melanjutkan apa yang disampaikan
oleh PDIP Pak Abubakar. Tentunya sama berniat yang baik, kalau lihat paparan menteri ya bagus itu,
karena itu akademis ya dan itu disusun oleh para doktor, ahli tentang bagaimana membangun tentang
aparatur negara ini. Jadi jangan mati duluan Pak Abubakar demi perjuangan.

Begini Pak Menteri, saya kebetulan ini pengalamannya saya bupati ini sampai 5 presiden ya, dari
mulai Pak Harto sampai pada Pak SBY. Ini kondisinya nyata di kabupaten-kabupaten. Kalau kita lihat
disini bagus sekali tujuan revolusi mental aparatur negara. Ini kondisional dulu perlu diketahui oleh
seorang menteri, PNS itu ngekor Pak. Sekarang Bapak pakai baju putih tanpa dimasukan, semua ikut
semua itu staf, itu contoh, PNS itu semua begitu, hanya ngekor doang, bagaimana Pimpinannya. Besok
Menterinya pakai rapi, necis, ikut. Besok bupatinya senang balab motor semua beli motor. Jadi ini kunci
dulu. Jadi kondisional di lapangan, kunci pokok dalam revolusi mental maupun memberantas korupsi,
saya ceramah dimana-mana ini ya, kuncinya para leader di unit-unit masing. Jadi artinya yang akan
direvolusi mental ini para bupati, gubernur, walikota dan presiden menjadi satu kesatuan bersama-sama.
PNS itu akan ngekor ke pelayanan publik disiplin macam-macam itu ngekor saja, karena saya pernah
lakukan. Saya terus terang saja saya jadi bupati 2 kali tetapi penggal wakt ya. Saya kebetulan dari TNI,
begitu disiplin kuat, saya jamin Kepala Desa sudah ada di kantor, takut semua karena kami pun jam 7
sudah di kantor, saya turun ganti bupati, amburadul lagi. Saya masuk lagi, kembali disiplin lagi, kuat,
masuk diganti bupati lain lagi, amburadul lagi. Ini kuncinya, ini kondisional. Jadi kalau Bapak gerakan

pemimpinnya dulu, presiden, gubernur, bupati, walikota bebas
bapak. Pak Bupati saya bersih dari KKN, saya jamin itu bisa
diminimalkan dan itu pernah saya lakukan, saya jadi pemimpin sepotong anak puteri saya tidak pernah ada
di pemerintahan, tidak pernah ikut campur urusan proyek, tidak pernah ikut campur lagi, pasti bersih.

Baik, ini yang pertama.

Yang kedua, kondisi PNS ini Pak, kondisi karyawan di Pemda itu. Ini kondisi pemda rata-rata
zaman saya jadi bupati itu kurang lebih 15 ribu, 16 ribu PNS. Itu 10 ribu itu guru Pak, 10 ribu itu PNS
guru, dan honorer itu imbang dengan PNS ini jumlahnya. Jadi kalau tadi PNS-nya 15 ribu, honorernya itu
9 ribu Pak. Nah kenapa terjadi seperti itu, karena tadi kalau bupati, gubernurnya tidak tegas, tidak ada
lagi semua UPTD apapun mengangkat honorer, yang celaka itu di sekolah-sekolah. Semua SK-nya para
kepala sekolah, begitu honorernya kurang, begitu mau diajukan PNS minta pertanggungjawaban bupati,
padahal SK itu oleh para kepala dinas. Ini menjadi pengetahuan bersama. Ini kondisi-kondisi nyata yang
ada di pemerintahan daerah. Jadi PNS dengan itu banyak sekali jumlahnya dengan honorer.

Saya kira itu yang pokok untuk saya berikan masukan. Jadi memang tidak gampang bicara
personil, saya pun pernah menjadi Kepala Biro Personil ya. Personil itu mengurus orang lahir sampai
mati Pak. Nah kelemahan di organisasi pemerintah ini tidak ada seperti TNI, ada tabel organisasi personil.
Apa itu artinya tabel ...(suara tidak jelas), sampai unit kerja berapa dibutuhkan orang itu disitu ada
jumlahnya, berapa spesifiknya dan khusus kalau di TNI itu ada Kepala Biro yang menghitung jumlah input
dan output. Tahun ini pensiun berapa, dia keahlian jurusan hukum, jurusan dokter, jurusan apa, itu
dihitung oleh mereka tiap tahun, begitu mau rekrutmen berikan kepada Kepala Biro yang merekrutmen.
Kalau kita kan tidak, dari BKN minta formasi, dari pemda-pemda mengajukan, ya pemda ngarang, saya
pernah jadi bupati juga ngarang akhirnya kan, ini jujur saja. Ini mungkin ada titip ini-titip ini Pak, ya sudah
saja kebutuhan untuk sarjana ini masukan, padahal tidak ada itu. Ini yang terjadi di lapangan.

Saya kira ini saja. Saya hanya memberikan masukan saja. Jadi kalau Pak Menteri berniat untuk
nanti revolusi mental, saya minta Bapak bersama Mendagri khususnya, bersama Menteri Aparatur
Pemerintah Daerah menyamakan dulu ini 1 langkah bagaimana ini bupati, walikota, gubernur menjadi
utuh, mari kita sama revolusi mental. Susah, saya ini menjadi anggota dewan baru ya, terus terang saja,
saya berkeliling ke daerah-daerah saya mau tanyakan juga apakah Bapak Gubernur sudah bisa
membersihkan dirinya dari KKN, apakah ada pejabat di daerah Bapak itu tidak Saudaranya, tidak adiknya,
tidak ada yang berani jawab. Kalau saya berani jawab dulu, memang tidak ada kakak, adik, keluarga. Ini
kunci Pak. Jadi saya berikan masukan sama Bapak Menteri, mudah-mudahan programnya bagus sekali,
didukung oleh staf dan kembali saya ingatkan PNS itu hanya ngekor, pakai baju putih semuanya tidak
dimasukin, bagaimana mau disiplin? Baju saja tidak dimasukin ngomong disiplin. Ini Pak Bapak cek ke
pemda-pemda, ada yang tidak ada apel, saya di Karawang sana apel hanya Senin sama Jumat,
bagaimana bicara disiplin. Coba Hari Senin, Hari Jumat Hari Olahraga kan, ini tidak ada keseragaman,
bagaimana kesatuan itu.

Jadi ini tolong saya ngomong keras gayanya saja, tetapi ini masukan yang positif dan ini faktual di
lapangan.

Terima kasih.

Dilanjutkan Pak Mujib supaya sekalian Golkar Pak.

F-PG (Drs. A. H. MUJIB ROHMAT):

Baik.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Ini to be continue.

Pak Menteri yang saya hormati,

Saya kira bahasa Pak Dadang ini dan Pak Yudi sudah kenal betul dengan Pak Dadang, saya kira
betul semuanya dan sebelumnya juga Pak Tagore juga bupati, sama-sama bupati. Saya kira
represinya jelas begitu Pak dan yang saya mau sampaikan adalah betul saya kira soal keteladanan.
Kalau bahasanya Pak Yudi adalah uswatun hasanah. Saya kira ini menjadi catatan yang pertama untuk
bupati dan juga kemudian adalah untuk PNS-nya.

lain lagi, bahwa PNS itu luar biasa susahnya masuk ke PNS. an sebagainya, sarjana dan sebagainya, kemudian mengikuti , begitu masuk mengikuti pendidikan berjenjang luar biasa, pengalaman juga luar biasa, di sisi lain adalah bupatinya kenapa syaratnya itu rendah sekali, sehingga dengan demikian yang menjadi masalah adalah PNS itu menurut saya Pak setelah saya reses ini ketemu bahasa yang menarik buat mereka, PNS itu harus tetap mulio, harus mulio, tetap mulio tanpa bakti, mulio kehidupannya, mulio juga pekerjaannya, karena itu jangan sampai PNS ini juga merasa dikuyoh-kuyoh juga oleh Bupati yang kemudian ternyata bupatinya tidak banyak pengalamannya. Lalu kemudian dipindah sana-sini, tidak menggunakan married system, suka-suka saja karena dia adalah bagian daripada Tim Sukses dan lain sebagainya. Ini saya kira kita tetap setuju dengan Pak Yudi bahwa ini harus dilakukan perbaikan it's oke tetapi jangan dikuyoh-kuyoh, jangan dihinokan lagi, karena itu saya berharap moga-moga besok itu match antara PNS yang sudah terdidik, setuju dengan capacity building setuju, tetapi juga harusnya Pimpinan Daerah pun harusnya juga sama, syukur-syukur bisa 1 langkah di atas daripada PNS-nya. Karena itu kalau tadi Pak Dadang mengatakan uswatun hasanah saya kira ini menjadi kunci, yakinlah teman-teman teman-teman PNS itu punya capacity yang cukup memadai, hanya tinggal persoalannya adalah bagaimana tadi mental-mental yang tadi itu, tetapi jangan distigma Pak, karena stigma yang dianggap jelek, semua saya kira juga tidak setuju karena PNS ini juga bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mungkin ada yang lukroh, itu juga barangkali karena keteladannya tidak menonjol disitu.

Saya kira ini menjadi catatan yang pertama.

Yang kedua adalah KASN-nya Pak. Posisinya KASN ini karena di pusat saja, kira-kira bagaimana mereka mengawasi terhadap proses mutasi, promosi dan lain sebagainya di daerah yang sedemikian banyaknya, apakah dia juga akan dibantu di daerah kalau KASN-nya hanya jumlahnya terbatas seperti itu dan KASN-nya itu apakah juga merangkap mahkamah juga untuk bisa mengadili mereka, tidak hanya sekedar kayak Bawaslu hanya memberikan rekomendasi, lalu tidak bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kalau ini dilaporkan kepada Gubernurnya atau kepada atasannya lagi, tetapi ternyata adalah suatu warna yang sama tidak akan dilakukan penindakan apa-apa. Oleh karena itu, barangkali KASN-nya ini juga harus ada empowering, harus ada penguatan terhadap KASN-nya untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih tidak sekedar rekomendasi, tetapi bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Yang ketiga, saya kira ini karena, yang ketiga adalah soal moratorium. Saya senang dengan jawaban pengantar tadi Pak Yudi, saya berikan apresiasi. Ini memang harus dilakukan dengan sangat hati-hati Pak. Di daerah saya ketika saya sebutkan moratorium birokrasi, moratorium CPNS itu dia mengatakan Pak Mujib sekarang kami di kabupaten minus 2.000 orang Pak, yang tadinya 11 ribu menjadi tinggal 9 ribu. Saya tidak tahu persis apakah 11 ribu itu karena memang kebanyakan, yang rasional justru 9 ribu tetapi dia menyebutkan ada Esselon IV yang tidak punya staf dan ini manajemennya kayak manajemen tukang jajan, ya ke pasar sendiri, dia pasarkan sendiri, dia olah sendiri dan lain sebagainya. Nah saya kira soal moratorium ini yang paling utama memang moratorium keahlian, saya kira ini memang yang harus dicermati dengan sungguh-sungguh baik kemarin kita kunjungan spesifik ke Bali, ke Jogja, kemudian ke daerah reses dapil kita masing-masing.

Saya kira itu terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Lanjutkan Partai Gerindra.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi II yang saya hormati;
Bapak Menteri dan rombongan yang saya hormati.**

Kami bersyukur karena hari ini Bapak Menteri telah memberikan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya memuat hal yang sangat prinsip yaitu ...(suara tidak jelas) yang salah

aparatur sipil negara. Deskresi sebetulnya di Bahasa Italia dan yang kita bahasakan dalam membahas Perpu yang baru lalu. Deskresi adalah penerimaan seorang pejabat publik untuk melakukan suatu tindakan dimana aturan atau ketentuan yang ada dalam kondisi terdesak dan memaksa. Biasanya dilakukan dalam rangka menggeser APBD di daerah kalau terjadi bencana alam. Namun Bapak Pimpinan dan Pak Menteri, deskresi ini tidak bisa efektif kita laksanakan kalau para penuntut yang ada di Kejaksaan dengan Kepolisian itu hanya mempunyai latar belakang ilmu pidana perdata dan tidak memiliki basic administrasi negara atau hukum tata negara, karena sebagian yang terjadi Pak Menteri saya lama di Inspektorat, bekerja sama dengan Menpan menangani persoalan wilayah dinas provinsi yang merupakan program lintas di daerah, saya melakukan hal-hal itu. Memang hasil temuan Inspektorat kadangkala bertentangan dengan tindakan aparat hukum, di satu sisi menggunakan hukum pidana, di sisi lain tidak pernah menggunakan hukum administrasi negara, sehingga kebijakan yang bersifat deskresi biasa dikaitkan bahwa ini pelanggaran pidana, memang ada kelemahan aparatur sipil negara, karena kadangkala mengambil kebijakan yang diikuti dengan surat keputusan kepala daerah, memang terjadi kondisi darurat pada waktu itu yang harus dijadikan payung bagi aparatur Pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat deskresi.

Yang kedua, Bapak Menteri juga kami memberikan apresiasi atas dilaksanakannya revolusi mental aparatur negara. Ini revolusi ya sangat ekstrim dibandingkan dengan evolusi, cuman saja pengalaman saya Pak Menteri sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, memang yang harus diutamakan bagaimana para Pimpinan-Pimpinan di tingkat atas itu bisa memberikan uswatul hasanah atau teladan, tidak akan mungkin Pak, saya pengalaman kurang lebih 5 tahun Inspektorat, tidak mungkin itu bisa dilaksanakan aturan kalau tidak ada yang bisa menjadi contoh di tingkat atas. Birokrasi inikan hadir karena demokrasi ya kita semua Pak Menteri ini hadir karena demokrasi. Demokrasi itu melahirkan birokrasi. Nah sistem rekrutmen birokrasi ini harus diperbaiki termasuk bagaimana rekrutmen pejabat-pejabat publik, ya sekarang ini ada Undang-Undang Pilkada yang baru mudah-mudahan bisa memperbaiki sistem rekrutmen dari Kepala Daerah, karena teman-teman tadi menyampaikan ada tamatan sarjana kesehatan diangkat jadi camat, dimana asas kompetensi, dimana married system yang kita kedepankan. Selama ini semua sistem berlaku di beberapa daerah karena sistem rekrutmen Pak, kalau dia menjadi Tim Sukses, tidak tahu apa latar belakangnya pasti dapat gerakan, yang tidak masuk Tim Sukses punya kompetensi yang bagus, pasti hilang jabatan itu dan ini harus diberikan contoh, mulai dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Jangan lagi ada ganti menteri ganti deputi, ganti sekjen. Kalau Kepala Biro Umum okelah, karena itu terkait dengan dapurnya Pak Menteri, tetapi kalau deputi-deputi yang lain kan kacau Pak. Sayang hari ini saya tidak dengar ada Lembaga Deskresi Negara yang hadir sebagai salah satu laboratorium peningkatan kapasitas dan profesionalisme pegawai negeri. Ini juga kami harapkan Bapak Menteri akan diberikan penguatan yang lebih besar sehingga lembaga administrasi negara betul-betul mampu mengupgrade kemampuan pegawai negeri berdasarkan kondisi-kondisi yang aktual sekarang. Misalnya contohnya, kita punya Penyuluh Pertanian tidak bisa lagi mengetahui bagaimana teknologi pertanian yang terakhir yang lebih mutakhir, dia masih menggunakan urea set a padahal alhamdulillah tidak ada lagi. Nah inilah mungkin yang kita harapkan dalam rangka mensukseskan program Bapak Presiden meningkatkan produksi pertanian, tentu yang harus diupgrade adalah Penyuluh Pertanian.

Terkait dengan Moratorium Pegawai Negeri, Pak Menteri saya sependapat kalau dilakukan zero growth, jadi peningkatannya tetap enol, peningkatannya tetap, tetapi seribu pensiun yang diterima juga seribu. Berarti zero growth, saya sependapat itu. Cuman saja Pak Menteri ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain tenaga medis. Tenaga medis itu setiap tahun penduduk Indonesia bertambah. Kalau ini tidak ditambah dan punya pelayan medis, maka banyak masyarakat di daerah-daerah itu akan mendapatkan kesulitan dalam rangka pelaksanaan medis termasuk juga menyangkut masalah guru. Ini juga sangat penting dan yang terakhir adalah K2. K2 ini sekali baru reses, kurang lebih 20 hari, saya akan bawa Pak Menteri daftar nama-nama diusulkan dan saya akan cek apakah yang diusulkan itu yang turun ke daerah, karena ada kejadian a, b, c diusulkan, bukan a, b, c yang turun ke daerah, dia hilang di tengah jalan atas permainan-permainan lembaga yang ditunjuk untuk melakukan ujian pegawai negeri pada waktu itu, bekerja sama dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya Inspektorat dulu, saya tahu bagaimana kasusnya.

Terima kasih.

Billahi Bissabilhaq,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dan ada tambahan dari Pak Bambang, silakan.

H, MH, M.Si):

izin Pimpinan.

Jadi kami terkena virus Partai Golkar.

Saya hanya menambahkan Pak, ada beberapa poin. Saya pernah menjabat Kepala Daerah selaku bupati 2 periode, dengan 2 sistem pemilihan yang berbeda pak menteri.

Kawan-kawan saya ajak bersama-sama bahwa saat ini adalah RDP yang sangat istimewa, saya menganggap itu karena kawan-kawan honorer K2 hadir ditengah-tengah kita bersama, tentunya saya berharap siang atau sore ini minimal ada statement daripada menteri, akan dikemana mereka, nah setelah RDP ini baru ada tindak lanjut. Kami dari Partai Gerindra pak menteri, hadir dengan kekuatan penuh 6 Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra lengkap hadir, ini menunjukkan komitmen kami untuk bisa menyelesaikan persoalan honorer K2. Kami sudah melakukan ketika kami menjabat, kawan-kawan tadi sampaikan bahwa ada sebuah dilema atau persoalan dan ketika kami mengajukan untuk pengangkatan honorer itu juga masih ada yang bodong ketika itu, 17 dari 1093 yang kami ajukan, 17 diantaranya bodong dan 1 diantaranya itu masuk proses Kejaksaan, tapi akhirnya sudah bisa terselesaikan. Harapan saya sore ini ada langkah-langkah yang harus diambil atau paling tidak komitmen antara Pemerintah dengan DPR RI, beberapa aspirasi yang masuk ditempat kami adalah satu pertanyaan, akankah honorer K2 itu ada seleksi lagi, seleksi tentang pengetahuan yang menurut saya kalau ada seleksi cukup dengan seleksi administrasi saja. Ini akan mempermudah karena bagaimanapun juga mereka sudah berjasa kepada Pemerintah Daerah, mereka juga sudah berjasa, artinya jasa ini ada nilai tersendiri, karena mereka dulu kemajuan teknologi kalau dibandingkan dengan kemajuan teknologi anak-anak sekarang kemungkinan agak tertinggal, tapi tolonglah ada nilai pointnya, nilai point mereka, pengalamannya paling tidak ada nilai 50% kalau dinilai dengan hasil seleksi. Itu yang perlu saya sampaikan yang pertama.

Kemudian kedua pak menteri, kemarin DPR sudah sepakat menetapkan Perpu 01, Perpu 02 2014 ditetapkan sebagai Undang-undang, walaupun ada revisi, tetapi prakteknya pak menteri sebagai konsekuensi Pilkada langsung, sangat banyak terjadi adanya politisasi birokrasi, dan kami sejak dulu sudah sampaikan, ini Menpan bagaimana?. Nah akankah didalam Undang-undang Pegawai Negeri Sipil yang netral ini benar-benar mereka netral atau tidak, pada umumnya mereka takut pada Kepala Daerah, saya juga merasakan ini walaupun kemarin saya juga Kepala Daerah sekaligus Ketua Partai juga pak, tetapi kamipun itu tidak sedasyat sekarang pak untuk politisasi birokrasi. Mohon nanti peran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa optimal mengawasi bagaimana kiprah Kepala-Kepala Daerah. Modusnya adalah dijatah, setiap PNS didalam TPSnya harus 10 orang didalam TPS nya, ada yang keras lagi sampai 50 orang.

Itu masukan kami.

Dan selanjutnya untuk Renstra yang telah disampaikan tadi oleh Menpan, kami menunggu nanti implementasinya di lapangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut dari Partai Demokrat.

F-PD (SAAN MUSTAFA, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.**

Pertama-tama saya ingin menyampaikan terkait dengan soal tenaga honorer K2, karena ini penting dalam setiap kita reses, baik reses Komisi, Kunjungan Kerja Komisi maupun reses perorangan di Daerah Pemilihan masing-masing, ini yang menjadi pertanyaan dan persoalan yang selalu ditanyakan setiap Anggota Dewan, terkait dengan honorer ini, terutama guru-guru, K2 maupun K1, karena mereka sudah menjadi tenaga honorer itu hampir puluhan tahun, ini bukan tahunan tapi puluhan tahun. Saya ingin contohkan misalnya di daerah saya sendiri misalnya, teman-teman SMP saya itu saya masuk SMA, dia

ngsung jadi guru honor, jadi tenaga honor dari tahun 88 keluar 45, 46 sudah berkali-kali ikut tes, itu nggak jadi-jadi PNS, kira-kira sudah puluhan tahun kan itu kan, nah sampai hari ini mereka tetap berjuang, bagaimana mereka menjadi PNS dengan batas 46 tahun ini. Nah ini penting saya sampaikan kepada pak menteri untuk dijadikan jalan keluarnya dan yang hadir disini juga ini dari gerakan honorer K2 ini juga menanti nasibnya ini yang terombang-ambing, mereka datang jauh-jauh dan sebagainya ingin memperjuangkan bagaimana nasib mereka ini yang sudah puluhan tahun mengabdikan untuk negara didunia pendidikan ini, kalau mereka tadi disampaikan oleh kawan kita dari Gerindra kalau dia harus bersaing dengan mereka yang baru, ikut bareng-bareng tes, itu kan selalu kelewat misalnya, tersisih, ini harus ada kebijakan khusus untuk menangani tenaga honorer terutama di guru ini, ini kalau bisa misalnya pada Rapat Kerja hari ini, ini ada satu komitmen dari menteri dengan DPR untuk bisa secepatnya menyelesaikan problem tenaga honorer K2 ini.

Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan juga pak menteri, ini terkait dengan soal reformasi birokrasi, semangat dari reformasi birokrasi itu kan tentu kita ingin bagaimana birokrasi kita itu dikelola secara transparan, akuntabel dan bersih. Inikan tujuan reformasi birokrasi, tentu ini juga nanti terkait dengan soal pelayanan terhadap masyarakat, kita mendambakan birokrasi yang bersih, birokrasi yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah disini salah satu media untuk menciptakan reformasi birokrasi itu, itu lewat reformasi mental, nah saya ingin sampaikan bahwa refolusi mental dalam rangka menciptakan birokrasi yang transparan, bersih dan akuntabel ini, inikan ada 2, menurut saya pendekatan, bisa struktural juga bisa kultural, struktural itu kan dari mulai proses rekrutment pejabatnya, misalnya dari pada menggunakan BIN untuk mengawasi PNS seperti yang pernah dilontarkan oleh pak menteri dulu ide itu, inikan lebih baik bagaimana yang namanya pimpinan-pimpinan disetiap unit dinas dan sebagainya, itu yang diawasi, karena kalau merekanya bersih, kalau merekanya transparan, kalau merekanya bisa mempertanggungjawabkan, bawahan kan ikut, tapi kalau misalnya selama dilevel pimpinannya itu tidak punya komitmen, punya kemauan dan tekad yang kuat untuk menciptakan birokrasi yang bersih, maka bawahnya akan ikut. Nah lebih baik bagaimana menciptakan para pimpinan-pimpinan di unit-unit, Kepala Daerah dan sebagainya itu yang bersih, itu yang harus diawasi. Contohnya misalnya keteladanan, sekarang bagaimana mungkin mereka mau bersih, mau apa, kalau mau jadi Kepala Dinas harus bayar, dan bukan rahasia umum lagi misalnya kalau seseorang ingin mendapatkan jabatan di daerah atau dibirokrasi, itukan harus mengeluarkan uang untuk tes, untuk menjadi PNS saja didaerah itu kan harus puluhan juta yang dikeluarkan, belum tentu jadi kan gitu lho, ini sebenarnya, ini semua tahu sebenarnya, birokrasi itu tahu semua, Pimpinan itu tahu semua bahwa untuk menjadi Kepala Dinas, untuk menjadi Kepala Bagian, untuk menjadi terima menjadi PNS itu harus bayar. Nah bagaimana bisa menciptakan birokrasi yang bersih di unitnya kalau dia untuk menjadi dinas itu harus bayar, maka yang terpikir adalah bagaimana mengembalikan modalnya, kalau nggak nanti dimutasi misalnya, tidak ada standar yang jelas itu mutasi jabatan disetiap daerah, ada dalam satu tahun bisa berapa kali mutasi, bagaimana kita mengukur kinerjanya kalau mutasinya terus menerus.

Nah, jadi revolusi mental itu menurut saya itu yang pertama hari ini harus dimulai dilevel struktural, level pejabatnya, pejabatnya itulah yang harus kita bersihkan, dan bagaimana mekanisme Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu menertibkan para pejabat dilevel unitnya untuk punya komitmen melakukan pemerintahan yang bersih itu tadi, tidak ada lagi birokrasi itu direntekan, dulu kan istilahnya kalau reori politiknya Arif Budiman soal birokrasi yang rente itu, birokrasi itu disewakan untuk mendapatkan keuntungan, kalau misalnya jadi Bupati, bagaimana jabatan bupatinya itu direntekan kepada orang-orang Kepala Dinas untuk mendapatkan uang, ini yang namanya birokrasi rente. Nah bagaimana kita memberhentikan, apalagi pak menteri ini kan Doktornya Doktor Ilmu Politik, paham benar dengan dengan soal birokrasi yang rente-rente itu tadi. nah selama birokrasi rente ini masih menjadi budaya kira, selama itu juga kendala untuk menciptakan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel itu sudah kita dapatkan. Nah ini penting menurut saya untuk coba kita sama-sama apa, pikirkan, sama-sama kita jalankan.

Nah terkait dengan isu-isu, karena ini juga penting sampaikan, walaupun ini hanya kebijakan-kebijakan yang misalnya gini, kita Kunker ke daerah-daerah terkait dengan kebijakan tadi disampaikan oleh Pimpinan Komisi terkait misalnya soal surat edaran larangan rapat di hotel, ini juga perlu saya sampaikan, walaupun dengan semangat dan niat yang baik, kan juga tetap ada implikasi, ada dampak, dampaknya itu kan apa istilahnya, kalau ada satu kebijakan tentu akan ada dampak terhadap hal yang lain, mungkin bukan dampak sistemik lah, tapi dampak ini kan dirasakan di daerah, misalnya keluhan dari apa, dunia pariwisata dan perhotelan, PHRI, itu akan banyak misalnya hotel-hotel didaerah dan kalau didaerah mereka menggambarkan itu rapat di hotel pajaknya masuk ke daerah lagi itu kan bagian dari sebuah, apa,

erti itu. Ini juga perlu nanti disampaikan, perlu dijelaskan, kalau lain rapat di Jakarta, mengundang orang-orang dari daerah, mereka kan rapat di, misalnya di kantor Menpan, tapi kan mereka dari daerah tidurnya kan nggak mungkin di Menpan, kan tidur tetap cari penginapan. Penginapan kan tetap di hotel, bahkan mereka berfikir kalau misalnya nginepnya di hotel kenapa misalnya rapatnya nggak disitu juga, walaupun tadi semangatnya dan niatnya itu baik, dan kita harus coba niat pak menteri itu tentu baik, semangatnya tentu baik, tapi implikasi-implikasinya juga tentu harus kita hitung dan harus kita pertimbangkan dan suara-suara dari masyarakat yang ada di daerah juga tentu harus menjadi bahan masukan kita dalam mengambil sebuah kebijakan.

Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Kalau ada dari nambah dari demokrat, mungkin nanti usul pada Pimpinan kalau perlu walaupun tiap fraksi diberi kesempatan, batas waktunya dibatasi, kalau 5 menit belum tersisa bisa dialihkan kepada Anggota yang lain.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi menambah sayap sana maksudnya.
Iya kalau dekat tadi bisa cepat, silakan tapi jangan kelewatan.

F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):

Begini Pimpinan.

Nah giliran saya jangan kelewatan, giliran yang lain boleh kelewatan. Ijin Pimpinan, kami dari Demokrat juga niru merubah ketentuan yang dibuat Golkar, jadi boleh 2 dan tanpa batasan, tapi saya tahu diri Pimpinan, karena masih banyak yang mau menyampaikan pak menteri, atas seijin Pimpinan sudah puas disampaikan ini mewakili Demokrat, tapi saya sifatnya hanya menambah-nambah saja dipinggir-pinggir pak. Persoalan yang disampaikan bapak yang ditanggapi oleh teman-teman, saya maaf pribadi pak, saya kasihan dengan bapak, apakah kira-kira mindset yang sudah bapak buat itu bisa nggak bapak kira-kira melayani semua persoalan masalah PNS dan birokrasi satu Republik ini, itu yang pertama. Tapi kalau melihat dari ilmu dan dari wajah bapak, bapak mudah-mudahan dilindungi Allah SWT, amin. Jadi bapak ada kekuatan. Apalagi kalau bapak memprioritaskan guru honor yang sudah bertahun-tahun itu diangkat dulu semua, itu doanya luar biasa pak, kadang-kadang diluar kemampuan bapak akan datang sendiri suatu imprasi yang ditolak oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena ini menyangkut kehidupan anak-anak bangsa.

Nah saya ke substansi pak.

Yang pertama Pimpinan, jangan dulu stop-stop Pimpinan, Pimpinan ini ada agak sentimen sama saya, saya membaca daripada kriteria yang bapak sampaikan, saya nggak dapat masukan dari mana-mana, walaupun teman-teman banyak yang dari Bupati nyampaikan, saya hanya orang biasa yang membaca, jadi disini pak, yang pertama rekrutment, banyak kejadian sesuai dengan kriteria 2005 pak, tapi banyak yang 2006, 2007 diangkat, tanya sama diatas. Caranya merubah tanggal pengangkatan, betul nggak? Ya, dirubah, ada yang tahun 2006 pak itu tidak bisa diangkat, dimasukan dalam *data base* yang ditahun 2005, ada yang Januari 2005 tidak diangkat, November 2005 diangkat, ada ...(suara tidak jelas) perbedaan pak. Bapak tadi ...(suara tidak jelas) saya minta pertanggungjawaban Bupati, kita berikan sanksi kepada Bupati karena masukan dari Bupati, 400 pak Bupati/Walikota nggak mungkin pak bapak bisa ngecek satu persatu, memundurkan tanggal itu, itu masalah PNS.

Dan kedua, masa kerja 1 tahun pada 31 Desember, ini adalah yang dibiayai APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan Bapak tidak menjelaskan disini yang berwenang itu siapa, pasti maksud Bapak Bupati atau Walikota atau Gubernur, tetapi ada juga pengangkatan honor yang sekian tahun itu tidak ditandatangani oleh Bupati, Walikota tetapi atas persetujuan lisan bupati walikota, satker-satker ... (suara tidak jelas) honor. Disini Bapak tidak mengatakan pejabat yang berwenang, ya kepala dinas berwenang, sudah itu satker camat pun berwenang, setahu saya yang diambil adalah honorer yang ditandatangani berturut-turut oleh Bupati dan Walikota. Nanti mohon Pak dikoreksi mengoreksi kriteria

ketempuhan, nanti banyak lagi honor-honor, pak saya dulu Bapak kriterianya ini.

Dan yang kedua Pak, masalah guru Pak. Ini tolong sekali Pak. Jadi yang paling banyak itu adalah honor masalah guru di K2 ini. Memang dia tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang maksud Bapak Pak Bupati atau Walikota. Memang para kepala sekolah-kepala sekolah yang mengangkat mereka, tetapi bohong Pak kalau Kepala Sekolah tidak mendapat izin dari Kepala Dinas Pendidikan, pasti dapat izin, paling tidak secara lisan atau tertulis, mereka angkat, begitu mereka mau, yang sudah honor bertahun-tahun di tempat-tempat terpencil sama Pak seluruh Indonesia, saya pernah bertanya ada yang sudah 15 tahun Pak tidak diangkat. Jadi saya hanya saran saja ya Pak kalau ini sependapat dengan Pak Menteri karena tugas Bapak banyak sekali kalau saya lihat, sering-sering hancur Pak, Bapak dibawa dalam persoalan ini, saya yakin Bapak manusia biasa, tanpa doa dan dukungan Pak Bapak tidak bisa bekerja sendiri. Jadi selesaikan saja Pak honor-honor yang kemarin menurut saya ya K1 K2 angkatin dulu, tutup buku, jangan takut, maaf Pak.

Pak Menteri, Pak Doktor,

Jangan takut dengan biaya Pak, jangan tahu advokat fiskal, ingat pepatah lama Pak, banyak anak banyak rezeki, angkat saja dulu Pak. Saya dulu mohon maaf Pak, bukan saya buka, siapa yang honor nganggur tidak ada beda, saya angkat, bagaimana biaya nanti dari Tuhan mereka punya rezeki. Jadi tolong diangkat saja dulu semua Pak biar Bapak tidak dapat benturan, karena yang Bapak angkat dengan yang tidak Bapak angkat yakin Pak 1 : 5 Pak, minimal seluruh Indonesia. Kalau dia bergerak semua, "Pak, Bapak akan kesulitan", lebih baik Bapak usulkan dengan Presiden yang 2005, yang sudah nganggur 2005 angkat saja semua, tutup buku. Moratorium atau apa, itu nanti, clearkan dulu ini supaya jangan ada gangguan.

Itu saja saya Pak.

Jadi Bapak angkat saja Pak ini. Jadi angkat saja Pak, jadi jangan sampai jadi persoalan terutama guru-guru itu sedih Pak melihatnya.

Itu yang terakhir Pak, saya sependapat dengan teman-teman yang lain banyak Naga Bonar Pak, Bapak tahu maksud saya. Itu saja. Naga Bonar itu Kepala Bironya terutama ini rawannya Esselon III Esselon II Pak, Kepala Bironya IV/a, Kepala Kasi-nya IV/b hitungannya, jadi saya maksud Naga Bonar. Itu saja Bapak kesulitan seluruh Indonesia.

Nah yang terakhir ini guyon. Saya sependapat dengan Bapak-bapak yang lain tadi. Jadi birokrasi ini pasti nurut Pak, ini masalah guru Pak, entah Bapak berani menyampaikannya atau tidak, saya tidak tahu, tetapi kalau ada saya, saya berani Pak. Saya pernah Pak dengar pendapat dengan Pak Jokowi waktu masalah penanggulangan banjir di Komisi V. Saya katakan sama Pak Jokowi "Bapak, manusia biasa Pak, jangan manajemen menjerit uang cape", saya menyampaikan, goreng sendiri, ngangkat sendiri, itukan dijabat, nah ini ada contoh, ini Bapak kan birokrasi reformasi penitipan coba ke Presiden Pak. Jadi saya beberapa hari saya ketemu anak sekolah Pimpinan yang biasanya anak sekolah itukan baju putih dimasukan. Jadi saya tanya sama anak itu "Hei, kamu pelajar mana? SMU sekian. Kok kamu sekarang bajunya tidak dimasuki?". Apa jawab mereka? "Pak, ya bagaimana orang presiden saja bajunya dikeluarkan Pak". Ini Pak ternyata sekalian reformasi sampaikan Pak, saya bertanggung jawab demi harapan kawan ini. Betul Pak.

Pak Pimpinan,

Ditanya, nama saya Zulkifli Anwar dari Demokrat.

Pak Menteri,

Jadi begitu ditanya "De, kok kamu tidak tertib pakaian kamu de. Kenapa? Biasanya kan anak sekolah bajunya dimasukin.". Pak, katanya "bagaimana mau kita masukin, Pak Presiden saja bajunya digulung dan di luar, ya masa kami tidak boleh wong Presiden saja boleh. Itu loh.

Sekali lagi Pak Menteri, saya mohon maaf. Tolong angkat saja semua.

Pimpinan,

Terima kasih atas waktunya.

KETUA RAPAT.

Saya kira tidak usah kita ulang soal itu Saudara Menteri, ya soal waktu.
Kami lanjutkan Fraksi PAN.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota;
Pak Menteri beserta jajaran;
Hadirin yang berbahagia terutama kawan-kawan dari Tenaga Honoror.**

Yang pertama, mengenai Tenaga Honoror. Saya kira ini kalau tidak diselesaikan di tahun ini, ini akan menjadi bom waktu Pak Menteri. Dimana-mana terjadi demonstrasi. Jadi kalau Pak Menteri hari ini begitu bersemangat dengan reformasi birokrasi, kalau 1 barang tidak bekerja maka itu tidak jadi berarti tanpa Pak Menteri. Kalau Tenaga Honoror selesai, saya yakin tugas mulia Pak Menteri yang lain akan terselesaikan. Artinya, begini. Kalau ini misalnya selesai, kawan kami tidak perlu jauh-jauh kedekatan lagi Pak Menteri ya kan? Jadi saya usul Pak Pimpinan isi salah satu kesimpulan rapat kita hari ini adalah menyelesaikan tenaga honoror K2 Tahun 2015 supaya tidak ada lagi nih yang begini-begini, kasihan juga mereka kan?

Nah bukti keseriusan Pak Menteri untuk tenaga honoror itu adalah dilihat dari usul nanti pengangkatan atau penganggaran APBNP. Kalau di APBNP itu terlihat atau diterjemahkan ada untuk K2, maka Pak Menteri serius untuk misalnya K2. Kalau misalkan tidak dianggarkan, berarti Pak Menteri tidak serius. Betul, artinya perlu dengan Menteri Keuangan yang selama ini saya di Komisi II sebab saya bertemu dengan Menteri Keuangan. Nah tugas kita Pimpinan perlu juga memanggil Menteri Keuangan untuk khusus membahas tentang K2 ini supaya dianggarkan di APBNP. Kalau kita berkoar-koar semua setuju tetapi tidak ada anggaran itu bohong itu, makanya teman-teman K2 juga harus laporan itu Menteri Keuangan supaya dianggarkan. Nah artinya begini Pak Menteri. Saya, betul saya jujur kalau ini tidak diselesaikan, kerja-kerja baik Pemerintah apalagi setiap hari hampir blusukan itu, kalau terjadi disini demo, disini ada demo apalagi nanti ...(suara tidak jelas) demo, itu kita dianggap tidak serius dalam reformasi birokrasi termasuk Komisi II, dianggap tidak bisa menyambung aspirasi kawan-kawan dari tenaga honoror ini. Ini saya khawatir kalau tidak selesai 2015, ini akan menjadi bom waktu terus Pak Menteri. Jadi kita sepakat dari hari yang paling dalam Komisi II per rapat hari ini, Pak Pimpinan kalau bisa itu kesimpulan kita salah satu dan yang paling fakta tadi saya katakan Pak Menpan dan Menteri Keuangan itu memasukan anggaran di APBNP bahwa K2 ini akan diangkat semua di Tahun 2015. Itu yang pertama. Jadi dipantau dulu, juga jangan dipantau disini terus, di Menteri Keuangan dipantau terus ada atau tidak anggaran itu.

Kemudian yang kedua, ini masalah melarang-melarang ini Pak Menteri. Yang pertama, melarang di hotel. Saya kira ini saya sudah dengar, Menteri Pariwisata sudah protes Pak Menteri kan. Nah yang saya tanyakan bagaimana sih sebenarnya koordinasi antar menteri begitu loh, apakah Pak Menpan ini sebelum memberlakukan larangan itu sudah konsultasi dengan Bapak Presiden atau Menko atau termasuk lintas menteri yang jika ini dilarang ada implikasi atau efek domeno yang akan mereka tanggung begitu loh. Ini yang saya mau tanya.

Yang kedua, mengenai rakyat ini Pak Menteri atau PNS yang dilarang oleh Pak Menteri untuk terlalu banyak undangan kalau menikahkan anaknya. Ini membuat ruyam ini silaturahmi Pak Menteri. Banyak yang protes kenapa kami tidak diundang, lah dilarang oleh Pak Menteri, jangan terlalu banyak. Padahal kan itukan sangat privat, sangat pribadi begitu loh. Jadi jangan terlalu banyak larangan Pak Menteri, karena itu akan menjadi boomerang juga bagi Pak Menteri. Coba dipikirkan kembali terhadap hal-hal yang sangat pribadi, karena antar pejabat saja dengan pejabat lain dalam relasi itu pasti berbeda Pak Menteri. Jadi menurut saya lepas saja. Yang Bapak Menteri lakukan jangan sampai korupsi kan kira-kira begitu kan, jangan menerima gratifikasi yang banyak, kira-kira begitu kan? Nah itu yang diperkuat Pak Menteri, jangan melarang orang untuk bersalaman dengan Penganten, jangan melarang orang untuk

h, dan saya kira bukan ranahnya Pak Menteri. Jadi saya juga mengundang banyak takut, ya kira-kira mereka takut diturunkan jabatan atau apaian Pak Menteri. Jadi menurut saya di Republik ini hal-hal yang sangat pribadi, siapa pun mari kita berikan kebebasan, apakah pegawai negeri, pejabat negara, atau yang lain itu adalah yang tidak bisa kita samakan satu sama lainnya.

Kemudian yang ketiga Pak Menteri. Ini penting sekalian, mengenai perubahan nomenklatur. Dengan banyak perubahan nama kementerian itu kalau saya tidak salah Pak Presiden waktu itu menarget 2 bulan. Nah bagaimana pengaturan tentang birokrasi yang dimana ada pengurangan Dirjen, ada juga penggabungan Menteri, atau ada semacam kementerian yang baru. Ini penting, karena ini juga menyangkut reformasi birokrasi Pak Menteri. Kalau misalkan ini tuntas, sejelas-jelasnya transparan, saya kira ini awal yang baik. Tetapi saya salut dengan Pak Menteri terhadap gebrakan yang sudah disampaikan tadi.

Nah yang terakhir, ego sektoral. Saya sangat salut Pak Menteri bisa menanggapi. Saya merasakan betul di Komisi II ketika kami membahas Undang-Undang Pertanahan Pak Menteri, masing-masing kementerian itu memakai ego sektoralnya sehingga karena ego sektoral Undang-Undang yang baru saja diketok itu menjadi tidak diketok karena ada kementerian mempertahankan persepsinya masing-masing, nah yang disalahkan siapa, DPR, DPR tidak becus, tidak bisa melahirkan Undang-Undang yang benar. Padahal kalau kita mau bedah, ternyata pemerintahan yang ego sektoral Pak Menteri. Nah saya mau tanya kiat apa untuk periode hari ini yang dengan revolusi mentalnya itu untuk menetralsir atau sedikit menurunkan ego sektoral itu. Nah kalau ini terjadi, saya yakin terhadap semua agenda kita terutama agenda prolegnas ataupun agenda reformasi birokrasi, kalau ego sektoral ini bisa kita tekan sedini mungkin menurut saya ini awal yang baik. Saya yakin dengan Pak Menteri masih muda, enerjik, wawasan juga bagus, dan berkurang, sebenarnya bagus dengan gagasan saya bisa kita lanjutkan, nah Komisi II tentu akan mendukungnya untuk mengawal itu semua, tetapi sekali lagi ini adalah perlu transparansi dari awal. Jadi mesti terbuka semua, mesti sedetail mungkin kita akan membahas. Nah kalau itu yang kita lakukan, saya yakin waktu masih panjang Pak Menteri. 5 tahun panjang Insya Allah, terobosan-terobosan Pak Menteri Insya Allah bisa kita eksekusi semua, tetapi yang paling penting tadi kalau 2015 ini terakomodir selesai, maka yang lain pun selesai juga Pak Menteri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Tidak, jangan 2, darimana? Amran atau Pak, yang duluan datang Pak Amran.

F-PAN (AMRAN, SE):

Ya pertama, tambahan.

Pak Menteri,

Ini yang saya ingin kritisi pertama mengenai agenda prioritas pembangunan RPJM. Nawacita 9 agenda. Yang pertama, menghadirkan kembali negara, ini menjadi pertanyaan saya, tanda tanya saya apakah sebelumnya itu negara tidak hadir. Ini saya mengkritisi mengenai bahasa menghadirkan kembali. Saya kalau bisa saya ingin memberikan masukan, bukan menghadirkan kembali negara tetapi mempertegas kehadiran negara atau meningkatkan kualitas kehadiran negara, karena kalau kita memakai menghadirkan kembali, seakan-akan negara tidak pernah hadir selama ini. Itu pertama.

Kemudian yang kedua, jika kalau umpamanya tetap ingin menghadirkan kembali, saya ingin minta penjelasan dari Pak Menteri, bagaimana sih penjelasan tentang menghadirkan kembali, apakah sengaja tidak pernah hadir. Kalau umpamanya menghadirkan kembali bisa dimaknai bahwa tenaga honorer itu kita selesaikan pada 2015 itu, itu barangkali, itu salah satu barangkali, karena selama ini Pak Menteri, kami ingin menyinggung sedikit tentang honorer, tenaga honorer ini sudah puluhan tahun mengabdikan kepada negara, memberikan tenaganya semaksimal mungkin untuk negara, dan kadangkala dia mengindahkan atau meninggalkan keluarga yang harus dia ingin perhatikan. Kalau umpamanya ini negara tidak pernah memberikan apresiasi kepada mereka maka negara dzalim kepada mereka, maka negara akan dzalim kepada tenaga-tenaga honorer. Tadi sudah disampaikan bahwa disanjung-sanjung

kayak ustad, kyai. Nah saya kira ini supaya tidak ada rasa
 arus diambil jalan keluar. Posisi sekarang Pak Menteri itu di
 sebelah kanan kiri negara, sebelah kanan kiri neraka. Kalau yang didzalimi itu ternyata tidak diberikan
 haknya, maka saya tidak menjawabnya itu, yang di atas memberikan jawaban tetapi kalau betul maka
 akan masuk surga.

Saya sungguh sedikit Pak Menteri, ini di Komisi VIII itu terjadi perdebatan dan kajian yang sangat
 mendalam terhadap tenaga honorer. Kenapa? 30% itu sekolah itu pendidikan itu di bawah kementerian
 agama dan dari 30% sekolah atau pendidikan di bawah kementerian agama itu 80% itu adalah sekolah
 swasta dan sekolah swasta itu rata-rata adalah tenaga honorer, sangat sedikit 1 atau 2 PNS-nya. Ini akan
 berimplikasi sangat besar terhadap kualitas terhadap anak didik dan itu adalah anak didik, anak-anak kita
 atau adik-adik kita atau anak-anak tetangga kita. Ini perlu menjadi perhatian. Baru-baru pengangkatan
 kategori 2, saya turun reses Pak Menteri yang banyak diangkat itu adalah pegawai honorer tenaga
 honorer yang ada kalau di sekolah itu yang sekolah DP, sekolah-sekolah swasta itu rata-rata tidak
 diangkat jadi PNS. Saya tidak tahu di tempat lain, tetapi ada 2 daerah yang saya dapatkan itu tidak ada
 yang berada di sekolah. Ini menjadi pertanyaan, apakah kita akan biarkan secara terus menerus seperti
 ini. Jangan sampai negara dzalim kepada mereka dan yang dzalim itu tentu adalah penyelenggara negara
 dan saya kira penyelenggaraan itu adalah termasuk Pak Menteri. Mudah-mudahan Pak Menteri tidak
 dzalim kepada mereka.

Kemudian yang selanjutnya mengenai moratorium CPNS. Saya kira ini perlu ada sebuah
 koordinasi dengan Kementerian yang lain. Kenapa? Karena kalau kita lihat Pak Menteri sarjana di
 Indonesia sekarang itu, itu termasuk urutan 5 besar dunia setelah China, India, Amerika, Rusia, baru
 Indonesia. Nah ini perlu betul diperhatikan terhadap lulusan-lulusan saya kira ini menjadi tanggung jawab
 kita semua baik itu DPR maupun itu di pemerintahan dan termasuk Kemenpan untuk bisa
 mengkoordinasikan bagaimana mencari jalan keluar. Ini juga perlu diperhatikan.

Kemudian, mengenai revolusi mental. Saya kira revolusi mental ini ada 2 Pak Menteri yang saya
 bisa melihat secara garis besar. Pertama persoalan sistem, kemudian kedua persoalan perilaku.
 Perilakunya baik, bagus tetapi kalau sistemnya tidak mendukung itu akan agak sulit dilakukan. Sistemnya
 bagus, tetapi perilakunya kurang bagus, saya kira juga tidak bisa jalan. Nah untuk ini, untuk rapat
 berikutnya saya kira saya ingin mendapatkan sebuah gambaran yang secara jelas tentang sistem yang
 ingin dibangun oleh Kemenpan terhadap bagaimana kalau katakanlah itu ada revolusi mental. Nah
 bagaimana sistemnya itu yang ingin dibangun, apakah kemudian di dalam sistem itu apakah itu sudah
 masuk dalam bagian bisa mengubah perilaku.

Saya kira ini hanya tambahan, karena masih banyak yang ingin bertanya.

***Billahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.):

Pimpinan, sekedar menambah sedikit saja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tidak usah lagi saya kira sudah cukuplah, nanti ada yang minta 3, 2 sajalah paling banyak nanti
 kita minta lagi Menpan untuk menjelaskan.

F-PAN (H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.):

Karena kebetulan kita juga sedang rapat dengan Menteri, dengan Bappenas, dengan keuangan,
 kebetulan memang saya melihat Pimpinan menunjukkan ketidak seriusan dalam rangka menyelesaikan
 persoalan-persoalan ini tidak tercermin di dalam hal usulan tambahan anggaran, karena kebetulan juga di
 APBN 2015 yang murni kebetulan juga periode yang lalu juga saya ikut membahas tetapi angkanya selalu
 sama di dalam Kementerian Pemdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Oleh karena itu Pak Menteri, sebagaimana tadi kan komitmen dalam rangka reformasi mental ini
 saya pikir perlu disosialisasikan. Tidak ada tambahan ternasuk juga kaitannya dengan dalam rangka
 penyelesaian tenaga honorer ini. Dan anggaran yang paling terkecil yaitu totalnya hanya 165,9 betul ya
 Pak Menteri? Jadi saya pikir itu perlu dipertimbangkan. Sebagai mitra kerja yang baik saya pikir dalam

hampir 200 triliun yang sedang kita bahas tidak ada satu pun

Saya pikir itu catatan yang ingin saya sampaikan, oleh teman saya Pak Yandri juga mengatakan kalau tidak tercermin di sana, maka ini dianggap tidak prioritas. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Lanjutkan PKB.

F-PKB (Dr. H. ZAINUL ARIFIN NOOR, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Saya ingin menyampaikan juga seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semua tentang tenaga buruh honorer, karena selama ini saya melihat khususnya di Kalimantan Selatan itu ada beberapa ribu tenaga honorer yang sampai hari ini belum terselesaikan, seperti apa yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Dan saya melihat di sana mereka sangat kesulitan sekali dengan pendanaan mereka, apalagi mereka di sana kalau kita melihat dari tempat tinggal mereka sampai dengan tempat mereka mengajar itu cukup jauh Pak, bahkan ada yang sampai naik perahu. Tapi mereka tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Nah, dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih senang mengatakan bahwa itu bukan merupakan daerah tertinggal dan mereka lebih senang mengatakan bahwa daerahnya itu daerah yang lebih bagus. Maka dalam hal ini saya berharap kepada Bapak Menteri sekiranya ini mereka dapat secepatnya untuk diangkat, yang tadinya mereka tenaga honorer itu secepatnya mereka diberikan satu kepastian oleh Pemerintah daerah.

Itu yang bisa saya sampaikan Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Sekarang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

F-PKS (H. JAZULI JUWANI, L.c., M.A.):

PKS dulu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

PKS ya, maaf Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (H. JAZULI JUWANI, L.c., M.A.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

**Pimpinan Komisi II DPR RI yang saya hormati beserta Anggota,
Bapak Menpan dan Reformasi Birokrasi yang saya hormati,
Teman-teman tenaga honorer yang setia menunggu.**

Saat ini PKS memang hanya dua orang di Komisi II DPR RI, tetapi perlu diketahui yang satu Pimpinan Komisi dan yang satu Ketua Fraksi. Yang pertama Bapak Menteri, kami harus mengucapkan selamat kepada Bapak Menteri atas terpilihnya jadi Menteri. Wajah Bapak memberikan harapan besar bagi anak bangsa yang teraniaya untuk bisa terselesaikan secara baik dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

semangat Bapak untuk melakukan berbagai macam terobosan, dan yang saya baca dalam statement yang kami baca di media. Wallahu Alam yang mengangkat tingkat kebenarannya, tetapi setidaknya di situ tercermin seorang Yudi yang gagah, ganteng dan pintar itu.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama tentang moratorium CPNS, apakah moratorium CPNS yang Bapak gulirkan ini sudah berdasarkan kajian yang dalam, data yang objektif, karena data ini juga masih ditemukan orangnya sudah di alam barzah tetapi SK-nya masih hidup. Ini juga terjadi di PNS Republik Indonesia ini, orangnya sudah bersama malaikat Munkar dan Nakir, tapi gaji dan SK-nya masih hidup. Ini artinya pembenahan dari sisi data saja inikan masih bermasalah kalau dilihat di situ. Yang kedua pemetaannya, PNS dan birokrasi yang ada di Republik Indonesia ini petanya apa sudah dilakukan sedemikian rupa, sehingga ibarat perahu atau ibarat kendaraan ini memang sudah lengkap seluruh terdistribusi sesuai dengan fungsi. Kemudian proporsionalitas rakyat Indonesia ini ada 240 juta, PNS kita itu kurang lebih 4 juta, apakah seimbang 240 juta dilayani oleh 4 juta PNS. Kami berharap dan kami menghormati kebijakan moratorium, tetapi kami berharap berdasarkan kajian, berdasarkan pemetaan yang objektif dan kebutuhan yang jelas dilapangan.

Terkait dengan tenaga honorer, saya ikuti kalau Fraksi ini adalah Fraksi yang ke-7 Pak Ketua, kalau pembicara ini adalah pembicara yang ke-11. Dari 11 pembicara tidak ada satu pun yang mengatakan jangan angkat itu honorer, tapi angkat itu honorer dalam waktu secepat-cepatnya. Dan mengangkat honorer ini Pak, jangan karena takut mereka demo Pak, kalau mereka demo bisa diselesaikan sama Polisi, jangan juga karena kasihan, mereka tidak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu, mereka sudah mengabdikan berkorban untuk bangsa dan negara ini tapi mana penghormatan bangsa dan negara kepada mereka. Itu sebenarnya yang mereka butuhkan. Karena itu, sudah hampir ketiga kali dengan 3 menteri diruangan ini bikin kesepakatan pak, honorer itu harus diselesaikan, ganti menteri ganti pula kebijakannya. Karena itu kalau tadi teman-teman menginginkan tahun ini harus selesai itu cukup bisa dimaklumi Pak, karena kita khawatir berlarut-larut persoalannya tidak selesai lagi, ini persoalan yang harus serius menurut saya. dan yang harus dikontrol oleh Menpan, oleh BKN sampai ke bawah itu data objektifnya honorer ini Pak, karena saya temukan dilapangan ada orang jadi tenaga honorer puluhan tahun tapi begitu pengangkatan yang diangkat adalah tim sukses kepala daerah yang menang, yang mengabdikan puluhan tahun itu hilang, datanya pun hilang, yang baru mengabdikan baru sebulan atau dua bulan atau baru jadi tim sukses masuklah datanya jadi PNS. Yang puluhan tahun jerih payah dengan gaji yang tidak jelas, keringat, meskipun Bapak melarang rapat di hotel, kantor kita pejabat negara ini masih pakai AC, rapat masih pakai makanan, tenaga honorer itu gajinya tidak jelas, honor pun juga kadang-kadang terlambat, kerjanya diperas. Karena itu tidak ada cara lain untuk ke-11 orang di forum ini dan Bapak Ketua harus menjadi kesimpulan rapat. Percuma juga Anggota Komisi II DPR RI ngomong berapi-api di tempat ini kalau nanti tidak ada kesimpulan rapat bahwa honorer ini harus selesai pada tahun ini juga, itu harus ada kesimpulannya.

Kemudian revolusi mental tadi, saya juga sebenarnya agak tergelitik dengan Bapak membatasi pejabat acara perkawinan dibatasi 400 Pak, dia bkin hari ini 400, besok 400 lagi, besok 400 lagi kalau itu persoalannya. Saya melihat ini, saya tidak ingin semangat Bapak itu nanti hanya dikesankan hanya sekedar pencitraan yang saya khawatirkan, targetnya apa sebenarnya membatasi ini yang kita maksudkan supaya umpamanya mereka, apakah dengan dibatasi menjamin mereka tidak korupsi. Di kita ini orang timur ini Pak, kan biasanya paguyuban luar biasa, Pancasila itu kalau di daerah lebih terimplementasi, orang bikin rumah jarang pakai tukang dia. Jadi begitu hajatan mereka pada datang semuanya, kalau hanya dibatasi 400 padahal saudara dan keluarnya bisa 5000 inikan jadi mutus silaturahmi. Jadi menurut saya ini harus ditinjau ulang pembatasan-pembatasan itu, saya tidak yakin itu efektif kalau mengurangi mereka untuk tingkat korupsi menyalahgunakan, saya kira pointnya bukan di situ Pak, itu bukan di situ menurut saya. Jadi boleh saja istihad saya salah menurut saya, tetapi rasanya orang timur itu banyak keluarganya, banyak saudara, tiba-tiba dalam hajatan dibatasi sombong sekali kau ini katanya, hajatan kok tidak unang-undang, bahkan kami dilarang datang karena takut sama KPK atas keputusan Pak Menteri, menteri macam mana yang memutuskan orang datang inikan. Jadi biarkan saja mereka, kalau Bapak mau kontrol kinerja ya silakan kontrol kinerjanya, kalau Bapak mau awasi penyimpangan ya awasi penyimpangannya, tapi jangan batasi orang silaturahmi dengan saudaranya dalam masalah-masalah ini.

Saya kira itu, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Saya kira dalam forum ini seluruh Fraksi pasti mendukung itu yang di atas. Untuk mempertegas kami lanjutkan Fraksi PPP.

F-PPP (DR. H. Mz. AMIRUL TAMIM, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pak Menteri dan seluruh jajarannya,
Teman-teman yang di balkon sana.**

Yang pertama, saya kira kita sependapat semua untuk menyelesaikan para pegawai honorer ini. Dan mungkin di ruangan ini teman-teman yang di Komisi II DPR RI ini masih ikut bertanggungjawab sebenarnya. Ada beberapa mantan bupati yang tentunya pada waktu itu ikut menandatangani pegawai-pegawai honorer ini atau bagaimana dulu mendata. Jadi kalau dilihat dari sisi pengalaman di beberapa daerah khususnya seperti yang pernah kami alami, bahwa pegawai honorer ini merupakan pegawai yang sebenarnya lebih disiplin dari pegawai yang kita terima pada waktu tes-tes PNS. Yang pertama, karena mungkin mereka dari awal ketika sekolah ini sudah mempunyai minat yang besar untuk mengabdikan, baik itu sebagai guru maupun tenaga-tenaga birokrasi di daerah. Kalau mereka ini kita tidak selesaikan sementara Pak Menteri tadi katakana bahwa biaya yang dikeluarkan untuk belanja aparatur itu cukup besar. Persoalannya tadi kita lihat bahwa masih ada 400 ribu lebih yang belum selesai.

Kemudian pengalaman yang lalu kita lakukan tes dan tadi ada 195 ribu yang selesai tes. Kalau kita lihat lakukan tes biaya juga, oleh sebab itu untuk menyelesaikan kedua ini tidak perlu lagi tes. Sebaiknya kita selesaikan tahun 2015 ini, karena kalau ini tidak diselesaikan tetap masalah Pak. Masalahnya dan efeknya di tempat lain, mereka menjadi pengangguran tidak ada kepastian, kemudian propokator masuk, kemungkinan ada yang masuk ISIS. Jadi itu biaya lebih besar, dampak lebih besar. Kemudian efek lainnya kalau mereka ini tidak diangkat pengalaman yang ada mereka ini banyak yang memegang dokumen-dokumen di daerah, mereka banyak yang memberikan pelayanan langsung di daerah, kalau ini mereka hilang dokumen itu juga sebagian akan hilang dan itu akan mahal Pak. Oleh sebab itu, tahun ini harus diselesaikan, persoalannya yang kita dengar tadi Pak Sukiman bahwa anggaran di Menpan itu tidak termasuk.

Persoalan yang kedua, saya curiga bahwa banyak bupati dan kepala daerah yang datang ke Menpan yang mungkin mengusulkan agar tidak ada penerimaan ini, karena berdampak terhadap besarnya pengeluaran belanja pegawai di APBD, karena di beberapa daerah sudah 80% lebih untuk belanja pegawai. Kenapa ini terjadi? karena itu yang disinggung oleh teman-teman, ketika tim sukses menuntut, ketika dilantik itu merekrut pegawai dari luar yang menjadi tim sukses, sehingga bahwa ini memberikan dampak terhadap belanja pegawai, sehingga belanja-belanja untuk pelayanan publik yang lain semakin kurang. Tentu jalan keluarnya jangan ada penerimaan pegawai.

Kalau ini terus kita menjadikan polemik, saya kira bangsa ini dan khususnya di daerah ini tidak akan selesai persoalan. Mari kita coba selesaikan yang K2 ini tanpa tes, kemudian seleksi ketat terhadap dokumen administrasi, karena tidak menutup kemungkinan dan pengalaman-pengalaman yang ada di tengah jalan itu diganti dengan orang-orang yang tidak pernah menjadi honorer, itu yang pertama.

Yang kedua, ini Bapak Menteri terkait dengan disiplin dan bagaimana terkait dengan birokrasi di daerah. Banyak kasus-kasus di daerah ketika terjadi mutasi atau serah terima kepala daerah itu rata-rata aparaturnya diganti. Tidak ada salahnya para kepala dinas itu status nonjok, kemudian mereka mengadu ke Pemerintah Pusat masuk, kemudian ada turun tim dari pusat tetapi tidak ada tindak lanjut sehingga ini menjadi model, model pembinaan aparatur di tingkat daerah. Tidak sedikit dari sekian ratus daerah otonomi ini, ini menjadi model di dalam pembinaan aparatur, rata-rata yang menduduki jabatan itu adalah tim-tim sukses atau mungkin seperti yang disampaikan tadi ada teman bahwa tidak menutup kemungkinan membayar jabatan itu, sehingga mereka walaupun ada masalah tidak berani di mutasi, karena sudah pernah setor. Pertanyaan saya Pak Menteri, bagaimana terobosan Pak Menteri agar bisa menembus ini karena terkait dengan otonomi daerah, kepala daerah menjadi pembina pegawai di daerah yang tidak bisa langsung aparat pusat melakukan tindakan, tetapi mungkin dengan tadi ada beberapa Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah maksud saya ini bisa mungkin ditembus agar

tidak terlepas dari peran Presiden yang di mana pembantunya pegawai yang ada pada tingkat yang ada di bawah ini bisa tidak semena-mena untuk melakukan hal-hal yang di luar aturan yang ada, itu yang kedua.

Yang ketiga, terkait dengan moratorium setuju kita tetapi ada persoalan. Persoalannya setiap tahun kita mengeluarkan anak-anak kita yang menjadi sarjana, mereka biasanya dan kita pengalaman semua mungkin anak-anak kita, keluarga kita atau teman-teman kita. Kita dari kecil itu sudah punya obsesi, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang menjadi Jaksa, ada yang menjadi Tentara, Polisi, tapi ada juga yang ingin jadi Pegawai Negeri, Kepala Dinas ini, Kepala Dinas itu, kalau ini tidak ada lagi penerimaan pegawai, ini mau dikemanakan sarjana-sarjana yang setiap tahun ini yang selesai, oleh sebab itu perlu ada pertimbangan kembali dalam moratorium ini, ini setiap tahun harus ada tes-tes Pegawai Negeri, yang bisa mengakomodir putra-putra yang ada didaerah untuk menjadi Pegawai Negeri. Itu yang ketiga.

Yang keempat, saya kira terkait dengan isu penghematan ini, ini memang banyak keresahan di daerah, kita lihat bahwa kunjungan kita kemarin di Jogja bersama pak Ketua Komisi, itu disarankan juga harusnya proporsionallah kita melihat ini, terkait soal, karena ada beberapa daerah kalau tidak ada kegiatan-kegiatan di hotel itu berdampak terhadap ekonomi kerakyatan yang ada di lapangan. Nah ini. Yang kedua, di daerah banyak hotel hadir itu karena ada komitmen Kepala Daerah, silahkan bangun hotel disini, sebentar kegiatan pemerintahan ini kita akan kesana dan kita sudah hitung berapa yang bisa berdampak terhadap penerimaan pegawai maupun seperti efek yang lain. Nah ini mungkin perlu dipertimbangkan terkait dengan penghematan, dan lain-lain saya kira seperti teman-teman yang lain, kita perlu dukung bagaimana penguatan daripada Menteri Aparatur Negara ini.

Saya kira demikian, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Dilanjutkan dari Fraksi.

F-PPP (KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY):

Sedikit saja terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hampir seluruh pembicara itu bercerita tentang honorer, ini saya pikir berikut ini juga akan honorer lagi, gitu kan, pasti begitu. Lalu sebagaimana tadi juga pak Jazuli, hendaknya dibuat sebuah kesepakatan, kalau menurut saya jangan tanggung-tanggung, bikin saja tim khusus supaya segera selesai tahun ini, kalau tadi terus membebankan kepada pak menteri, satu itu.

Yang kedua pak menteri, tentang pengurangan atau tidak ada pengangkatan PNS baru. Bagaimana dengan, maaf saya dari Dapil Jabar X, itu ada otonomi baru, Kabupaten Pangandaran, nah bagaimana mengisi birokrasinya disitu kalau tidak ada pengangkatan PNS baru. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, lanjut Partai Nasdem.

F-NASDEM (DR. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si):

Terima kasih, sini pak, Kanan.

KETUA RAPAT:

Ya, silahkan pak.

**Bapak Menteri dan segenap jajarannya,
Kepala BKN,**

Fraksi Nasdem di ruangan ini sebenarnya ada 3, tapi yang hadir cuma satu orang, yang 2 mengikuti rapat Pleno di perluas. Jadi kalau saya berbicara agak lama, saya mewakili yang 2 orang itu pak.

Bapak Menteri dan segenap jajaran,

Pertama, mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ini perlu dipertegas agar ini P3K ini tidak diplintir menjadi tenaga honorer nantinya. Saya waktu reses kemarin, sudah ada persepsi itu muncul, bahwa mereka yang tidak terakomodir atau kemungkinan tidak diangkat menjadi CPNS dari Tenaga Honorer ini bisa dialihkan menjadi P3K, saya kira ini perlu segera ada penegasan dari Menteri ke daerah, apa itu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Saya waktu masih ikut di Tim ... (suara tidak jelas) ikut membahas RUU Aparatur Sipil Negara ini saya terlibat dalam pembahasan ini, yang saya tangkap ketika itu, P3K ini adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus yang tidak bisa disiapkan oleh pemerintah, sehingga orang-orang seperti inilah yang direkrut, kalau persepsi yang mengatakan bahwa tenaga honorer itu akan ditransfer menjadi P3K, ini amburadul lagi ini pak, semakin amburadul, karena itu saya mohon Pimpinan, pak Menteri, segera buat penegasan, apa kriteria yang boleh disebut dengan P3K itu, supaya tidak amburadul dikemudian hari, apalagi beberapa waktu lalu saya membaca di koran, saya lupa siapa yang memberi statement, dari pejabat di Menpan kalau nggak salah itu mengatakan bahwa tenaga honorer K2 itu bisa ditransfer ke P3K, saya baca di Kompas kalau nggak salah saya baca itu pak, nah ini perlu hati-hati.

Yang kedua, mengenai KASN, saya mengusulkan KASN ini segera melakukan yang namanya audit marine, audit jabatan, kenapa? Ini keluhan dari semua pembicara terdahulu, terkait dengan 2 hal,. Terlalu pejabat di daerah yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman, terlalu banyak, karena itu KASN kerja pertamanya, saya minta pak Menteri, tugaskan mereka melakukan audit marine. Seberapa banyak pejabat-pejabat di daerah yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tidak sesuai dengan latar belakang pengalaman, tadi sudah disebut Sarjana Agama jadi Camat, apa itu, Sarjana Perawat jadi Camat, Sarjana Sosial jadi Kepala Dinas PU, Sarjana Hukum jadi Kepala, sementara Sarjana Tekhnis Sipil jadi Kepala Dinas Perkebunan. Ini semua harus dibenahi.

Yang kedua, terkait dengan audit marine ini adalah, ada beberapa mantan Napi yang jadi Pejabat Struktural, yang mencuat dipermukaan adalah di Sumatra Utara, ini yang di Televisi sudah berapa hari muncul, Sekdanya bekas Nara Pidana korupsi, ini mau diapakan ini, padahal di Undang-undang ini mengatakan bahwa pejabat yang melakukan kesalahan dalam jabatan itu harus diberhentikan dari jabatan, yang sementara menjabat saja harus diberhentikan, ini kok belum menjabat malah diangkat, perlu ada penegasan dari Menpan, terhadap ini.

Yang kedua yang saya temukan, pada saat reses, mantan Nara Pidana korupsi dihukum 2,5 tahun penjara itu diangkat sebagai Kepala Inspektorat, Kepala Inspektorat di Kabupaten Luwu Utara. Terakhir di Kota Palopo kemarin, ini sudah hampir 5 tahun, mas-mas, dikontek pak menteri itu.

Terakhir, bukan terakhir yang mau saya sampaikan pak Ketua, terakhir temuan saya direses kemarin, ada pejabat di Kota Palopo yang juga dilantik bekas Napi korupsi, di Kota Palopo, ini baru kejadian 2 minggu yang lalu. Kemudian di Kepri juga terjadi hal yang sama, mantan Nara Pidana korupsi diangkat menjadi pejabat struktural, nah saya kira ini tugas pertama dari KASN, agar supaya kita merasakan itu.

Kemudian mengenai reformasi birokrasi, dari hasil reses kemarin, keluhan terjadi di daerah, mengenai PMPRB, saya tidak tahu apa masih jalan apa tidak ini, Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi, habis waktu pejabat di daerah untuk melakukan asesment. Tidak ada lagi, syukurlah kalau tidak ada lagi, ini pekerjaan yang sia-sia pak menteri ini. Saya bersyukur kalau saya tidak, tapi itu keluhan yang saya terima dulu.

Kemudian yang selanjutnya mengenai istilah hak prerogatif Kepala Daerah, apa yang dikeluhkan teman-teman tadi terlalu banyak orang yang diangkat tidak sesuai dengan kompetensi itu berlindung dibalik hak prerogatif Kepala Daerah, sepanjang yang saya ketahui, saya juga bekas Kepala Daerah, 11

jadi Kerteker, kemudian terpilih 2 kali, jadi 3 kali dilantik, itu karena yang mau diangkat ini adalah pejabat-pejabat teknis yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu, makanya ada Baperjakat, Baperjakat mengusulkan 3 orang, Bupati memang memilih dari apa yang diusulkan, tapi itu bukan hak prerogatif ketika sebelum diusulkan oleh Baperjakat. Nah ini yang banyak salah dimengerti, jadi saya kira juga perlu ada petunjuk ke daerah mengingatkan mereka bahwa Kepala Daerah tidak punya hak prerogatif. Hak prerogatif Kepala Daerah menentukan setelah ada 3 nama yang diajukan oleh Baperjakat, ini perlu juga diluruskan pak menteri. Nah istilah saya, kenapa banyak terjadi hal seperti ini, orang diangkat tidak sesuai kompetensi, bekas Nara Pidana diangkat menjadi pejabat struktural, istilah saya mohon maaf, agak kasar saya katakan, ini karena terlalu banyak Kepala Daerah, pejabat di daerah itu bersetubuh dengan jabatan, ini saya mohon maaf. Kenapa? Kalau Kepala Daerah digelar 0:1, istrinya 0:0, istrinya lebih berkuasa daripada Kepala Daerah, anaknya lebih berkuasa dari Kepala Daerah, ajudannya bahkan lebih berkuasa dari Kepala Daerah, ini semua perlu diatur ini, perlu diatur, perlu penegasan agar supaya pejabat-pejabat kita di daerah tidak semakin banyak yang bersetubuh dengan jabatannya.

Kemudian mengenai standar kompetensi, persoalan yang dihadapi oleh daerah adalah jabatan-jabatan yang ada itu tidak memiliki standar, jadi kalau kita mau melakukan uji kompetensi kita nggak punya standar. Nah saya kira Kemenpan atau standar kompetensi ini adalah domain dari Kemenpan untuk menentukan, kalau di daerah mungkin ada asisten, mana standar kompetensi itu didasarkan pada rumpun kompetensi, ada rumpun kompetensi pemerintahan sesuai dengan asisten I, ada rumpun kompetensi administrasi pembangunan, ada rumpun administrasi keuangan. Saya tidak tahu apa yang harus diisi dalam rumpun itu, sehingga ketika ada nanti audit marine dari KASN, ada acuan, ada acuan orang ini tidak sesuai, tidak sesuai, ini penting pak, karena sampai sekarang belum ada itu.

Nah terkait dengan tenaga honorer, tenaga honorer ini masalahnya ada 2, masalah utama, banyak yang memenuhi syarat tapi tidak diangkat, banyak yang tidak memenuhi syarat tapi diangkat jadi CPNS, ini masalah pokok, sebenarnya sudah ada PP yang terbit, PP 48 tahun 2005, di Pasal 8 tegas mengatakan Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer dan ada sanksi administrasi dan pidana, ini penting, tetapi saya heran kenapa tiba-tiba Pemerintah yang membuat PP ini pemerintah sendiri yang melanggar, ada apa ini. Dulu waktu saya masih di tim quality assurance, waktu Menteri saya masih pak Mangindaan, saya berdebat dihadapan pak Wapres, saya protes itu pak, saya protes ketika pemerintah akan melanggar sendiri PP yang akan dia buat, karena ini membuka kotak vendora, kita sendiri membuka kotak vendora, saya bekas Bupati Luwu Utara, saya bersurat waktu itu ke BKN, saya bersurat ke Menpan, saya berani jamin tidak ada lagi tenaga honorer tercecer di daerah saya, karena saya konsisten kepada Pasal 8 itu, kalau dia tercecer 10,20, 50 orang oke lah, kalau sampai 6000 orang tercecer sangat tidak masuk akal, jadi bukan saya tidak setuju tenaga honorer diangkat jadi CPNS, tapi harus benar-benar yang memenuhi syarat. Kita mau negara ini dipenuhi oleh pegawai, kemudian fasilitas publik tidak jadi terabaikan, ini kan soal pilihan pak, ini soal pilihan, saya bukan sekali lagi, saya bukan tidak setuju tenaga honorer diangkat menjadi CPNS, tapi sepanjang itu memenuhi syarat. Waktu itu saya bikin surat ke BKN, sebagai staf khusus Wakil Presiden, saya bikin surat ke Menpan, saya sebut nama-nama ini tidak memenuhi syarat dan saya berani jamin sampai ke Pengadilan, tetap diangkat itu pak Eko, tetap orang itu diangkat. Nah pertanyaan saya adalah apakah ini tidak ada latar belakang apa yang disebut tadi itu orang mau, orang mau jadi pegawai testing dari umum saja yang belum tentu lulus mau bayar pak, apalagi ini sudah pasti diterima, tidak ada makan siang gratis itu, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau orang testing umum saja belum tentu lulus mau bayar, apalagi ini, sudah pasti diterima, berapapun dia akan bayar, jadi Pimpinan, bukan saya tidak setuju mau diangkat jadi PNS, tetapi harus betul-betul yang memenuhi syarat dan saya berani jamin untuk daerah saya tidak ada lagi yang bodong pak, tidak ada lagi yang tercecer.

Ada satu pertanyaan paling gampang, ketika berdasarkan PP 48, dilakukan pendataan seluruh pegawai, waktu itu kemana orang yang 200 orang itu kok tidak ikut testing, kemana dia, persiapan untuk melaksanakan pendataan pegawai tahun 2005 itu, yang namanya testing tidak 1 minggu persiapannya, berbulan-bulan disampaikan, diumumkan, sehingga mereka yang menjadi tenaga honorer tidak akan diminta tidak akan meninggalkan tempat, jadi kalau pada saat ada testing dia tidak ada, pertanyaannya kemana dia, kalau dia mengaku sakit, cari di rumah sakit, ada nggak datanya di rumah sakit, kalau kita mau kerja benar, coba buka data di rumah sakit, apa betul dia sakit, karena ada mengatakan saya waktu itu bersalin, cek apa betul dia bersalin. Kalau ada penugasan, siapa yang tugaskan dia, sudah ada penyampaian dari Bupati, tidak boleh meninggalkan tempat. Jadi ini perlu diluruskan, kita sepakat, tenaga honorer kira angkat semua, tetapi, tetapi jangan yang tidak memenuhi syarat pun diangkat, tenaga honorer pak menteri, ini marak terjadi di daerah kalau incumben ikut dalam pemilihan Kepala Daerah, dia merekrut

li tim sukses, sekaligus hadiahnya menjadi tenaga honorer,

KETUA RAPAT:

Itu gara-gara pemilihan langsung.

F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si):

Bukan persoalan itu pak.

Jadi pak Menteri, di daerah coba cek, di daerah-daerah yang Kepala Daerah incumbent ikut Pilkada pasti tenaga honorer membengkak, itu pasti. Nah, apakah orang seperti inipun akan diangkat jadi CPNS, apa akan diangkat, kalau saya pribadi tidak setuju karena ini akan menjadi beban buat Pemerintah Daerah, akan merugikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, karena uang yang seharusnya untuk pelayanan publik dipakai untuk membayar orang yang tidak berhak, jadi ini perlu dipertimbangkan. Saya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, harus diangkat semua, tidak harus semua diangkat pak, rusak negara ini kalau semua diangkat, tapi yang memenuhi syarat angkat dia, tidak ada jalan lain. Nah sekarang yang memenuhi syarat ini tugas kita semua, kalau sudah ada jaminan dari saya misalnya bahwa disana tidak ada lagi tenaga honorer tercecer, kenapa tetap diangkat, kemarin tenaga honorer K2, saya pulang, tenaga honorer K2 siapa yang ngisi, istri pejabat, anak pejabat, saudara pejabat, itulah mayoritas yang mengisi tenaga honorer K2 di beberapa daerah. Nah pertanyaan saya, apakah orang seperti ini kalau saya temukan dan saya laporkan, pak Menteri akan membatalkan SK nya. Ini pertanyaan saya. Karena dulu saya laporkan tidak ada tindakan. Saya sebagai staf khusus Wakil Presiden waktu itu bersurat resmi, pakai kop kantor Wakil Presiden, tapi nama-nama yang saya sebutkan tetap terangkat, tetap terangkat.

Yang terakhir pak Menteri. Mengenai surat pertanggungjawaban mutlak, beberapa daerah, Kepala Daerahnya sudah membuat SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak), SPTJM yang diterbitkan ketika limit waktu sudah berakhir untuk mengangkat tenaga K2 itu menjadi CPNS. Bagaimana nasib SPTJM ini, apakah dia dinyatakan *Innalillahi Wainalilahi Rojiun* atau tetap akan dipertimbangkan. Kami dijamin Pak, masa kita tidak percaya Walikota, dia sudah membuat SPTJM yang sanksinya adalah tidak ada dana administrasi.

Itu saja Pak Menteri, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, sekarang jam 17.15 WIB kita harus perpanjang, setuju saudara-saudara sebelum Magrib kita akhiri kita akhiri?

(RAPAT : SETUJU)

Baik, yang terakhir dari Partai Hanura.

F-HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., MM., MH):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Bapak Menteri dan jajarannya.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Memang kelihatannya Bapak Menteri ini sangat berat bebannya. Kalau boleh saya usulkan sebelum pengangkatan itu dilakukan bukan hanya sekedar melakukan audit..., lakukan audit foreksi baik terhadap proses, terhadap legalnya, baik terhadap administrasinya, baik terhadap performance. Baru kelihatan nanti benang merahnya, jadi bukan hanya sekedar audit...di forensik itu mungkin yang pertama. Dan kemudian Bapak Menteri, kalau bisa kita berpandangan bahwa semua anak bangsa ini adalah asset, jangan kita lihat anak bangsa ini menjadi biaya repot kita nanti. Singapore hanya membangun manusia, karena manusia lah yang *reneable*, ini harus dimuat cara pandangan, filosofi pandangan kita bagaimana kita *me-maintenance* anak bangsa.

ina Bapak Menteri ini menghadapi ini semua, saya benar-benar dari PAN melakukan reformasi birokrasi di KPK, di Kepolisian, di Kejaksaan, di Kejaksaan, kita ingat Kapri yang kemarin bermasalah karena masalah pada saat dia di lembaga pendidikan Polisi. Ternyata di sana terjadi transaksi, begitu juga penyidik-penyidik yang diberikan hak deskripsi untuk menangkap orang yang pada akhirnya karena tidak jelas menjadi transaksional, bagaimana kita menertibkan ini. Apakah Pak Menteri sudah sampai ke sana, karena hampir semua proses penegakan hukum bermula di penegak hukum. Nah, ini Pak Menteri mungkin salah satu diantaranya.

Yang kedua, pada saat saya kunjungan kerja di 2-3 daerah saya ke Jawa Timur dan Kalimantan Selatan pada waktu itu Banjarmasin. Apa yang saya temukan di sana, waktu itu saya berbicara dengan Kakanwil Agraria mereka meminta 6000 tukang ukur, saya katakan tanah di Kalsel ini sejak zaman nenek moyang kita tidak pernah nambah dan tidak pernah kurang, kok bisa ada tiba-tiba anggaran untuk 6000 orang pengukur, yang tambah adalah persoalan, persoalan kenapa? karena birokrasi yang tidak benar, yang harusnya AJB dibuat hak milik, hak milik dijual menjadi hak pakai dan seterusnya. Jadi saya mendapat berbagai persoalan di daerah.

Kemudian ada juga satu kementerian bahkan beberapa kementerian yang strukturnya tidak jelas, ada kementerian di dalam memberikan pelayanan umum melakukan *outsorch* kepada swasta untuk melakukan uji kompetensi terhadap sebuah benda, apakah layak digunakan atau tidak, dengan SK Dirjen. Coba Bapak lihat di SKK Migas, mereka membuat SK Dirjen memberikan hak otoritas kepada seorang atau beberapa swasta untuk melakukan uji kompetensi terhadap mesin yang harus melaksanakan pekerjaannya di satu lapangan *fuel* pengeboran minyak. Harga barang ini 1 juta, ada izin, ada surat dari Amerika bahwa ini layak, harganya 1 juta tetapi setelah saya lihat untuk mengeluarkan sertifikasi barang ini harganya 10 juta, ini terjadi saya bisa kasih datanya. Jadi pelayanan publik itu juga menjadi sangat-sangat tidak benar karena birokrasi yang dibuat berlebihan.

Yang kedua, saya berkunjung ke Jawa Timur waktu itu saya kasihan lihat Menteri Tenaga Kerja ini. Waktu itu saya mencoba berbicara dengan Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan di sana, apa yang terjadi? di sana struktur di bangun satu struktur Direktorat Pengawasan, dididik pengawas-pengawas fungsional, 1 orang dididik itu 6 bulan dengan nilai rupiahnya kurang lebih Rp500 juta satu orang, dididik selama 6 bulan, apa yang terjadi? setelah didistribusikan mereka ke daerah, ada yang dibuat menjadi tukang jaga makam. Nah, ini hal-hal yang seperti ini jadi itu jelas sekali. Coba nanti koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja ada Direktorat Pengawasan yang mendidik pengawas-pengawas, penyidik-penyidik Pegawai Negeri Sipil yang begitu sampai dia di dinas, dia ada jaga makam yang bukan kompetensinya.

Tadi mengenai sahabat-sahabat kita ini yang dari K2 ini, saya lebih cenderung memilih kalau boleh apakah dilakukan dulu forensik audit baru diambil satu kebijakan atau setelah diangkat karena pertimbangan lain. Tapi saya lebih menekankan proses audit forensik itu menjadi perlu, ssaya tidak melihat ada nilai-nilai lain. Kemudian masalah *zero growth*, itu yang saya katakana tadi kita berkunjung ke berbagai negara sebelum saya menjadi Anggota DPR RI, saya tadinya sebagai seorang lawyer di corporate. Saya masuk kita berbicara tentang sumber daya manusia posisi di dalam neraca itu di dalam asset bukan di dalam libelity, bukan sebagai biaya. Nah, semakin banyak orang kita didik inilah yang bisa kita jual ke luar negeri dengan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Jadi pandangan saya kalau untuk catatan PNS, saya memang pernah menjadi PNS, orang buta, orang tuli, pokoknya datang ada istilahnya tidak boleh 2 kali terlambat, kalau kamu datang terlambat pulang jangan terlambat, sampai sedemikian rupa yang dibangun sangat negative. Nah, saya hanya mohon juga kepada Bapak Menteri tolong di dalam Kementerian PAN dan RB ini saya mendapatkan masukan, banyak pemain Bapak Menteri, banyak penjual dagangan seperti tadi dikatakan ada kabupaten yang dikuota, ada ini tolong ini diaudit juga ke dalam ini. Ada yang bermain di dalam, nanti kalau perlu saya kasih namanya saya tahu. Jadi Bapak Menteri, jujur saya katakan saya harus mendukung program Bapak Menteri apalai saya dari Fraksi Hanura. Jadi membersihkan ke dalam itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena kalau nanti Bapak Menteri berbicara dengan saya sering berhubungan dengan Bapak Menteri, saya bisa memberikan inisial yang memperdagangkan kuota ini ke berbagai kabupaten. Jadi tidak salah tadi pandangan Bapak Luthfi yang mengatakan bahwa ada memang kalau di sini begini harganya sekian, dan ini di Kelembagaan Kementerian PAN dan RB.

Itu saja barangkali ditambahkan karena menyangkut tadi kita bagi menyangkut K2 ini perlu ada hal yang spesifik yang akan diantar oleh sahabat saya Frans. Demikian barangkali pandangan saya Pak Pimpinan, Bapak Menteri dan jajarannya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, langsung saja Bapak Ketua.

Yang saya hormati Bapak Menteri dan jajarannya.

Jadi saya mendengar dari beberapa teman-teman di Fraksi saya di Komisi II DPR RI, intinya kami semua ini memohon kepada Bapak Menteri, supaya saudara kita yang hadir di sini termasuk juga yang ada di Indonesia supaya hajat hidup mereka bisa dibantu oleh Bapak Menteri, dibantu oleh Bapak Presiden Jokowi, supaya diangkat menjadi CPNS. Karena mereka semua memiliki anak dan istri, memiliki suami dan anak, dan utang mereka pasti banyak, tapi kalau mereka diangkat menjadi CPNS dan dianggarkan tentunya SK mereka bisa digadaikan di bank dan lunas hutang-hutang mereka. Terus terang saja di Lampung banyak juga honorer kami yang belum diangkat. Nah, itu kuncinya ada di para bupati, walikota dan semuanya. Jadi jikamana Bapak Menteri izinkan honorer yang belum lulus tes yang sekitar 450 ribu sekian yang belum lulus tes ini bisa diberikan penjasaan yang khusus untuk Bapak Menteri supaya mereka bisa diangkat, karena inilah harapan kita satu-satunya Bapak Menteri.

Selanjutnya ada Surat Edaran Menteri zaman Pak Faisal yang mana guru yang golongan IVA mau naik ke IVB itu harus buat 3 karya ilmiah dan itu harus diuji. Nah, ternyata ini kendalanya banyak sekali terhadap guru-guru ini, karena apa? Mereka tidak ada waktu lagi untuk membuat karya ilmiah ini dan diuji. Nah, sehingga banyak guru-guru di daerah di Indonesia ini yang mentok sampai IVA sampai 6-12 tahun, kalau 12 tahun berarti mereka golongannya IVD. Nah, ini saya minta dengan sangat kepada Bapak Menteri supaya SE ini zaman Bapak Faisal dicabut, karena guru-guru yang belum IVA ini sudah mentok golongannya, karena harus buat karya ilmiah dan diuji.

Selanjutnya terkait dengan masalah pejabat negara termasuk juga bupati, walikota, di sini banyak saudara-saudara saya paman saya mantan bupati, mantan walikota, gaji Pak Walikota dan Bupati ini Rp5.900.000,- bilamana Pak Menteri izinkan diusulkan kepada Bapak Presiden untuk dinaikkan gajinya. Begitu mereka setelah pensiun setelah mengabdikan sebagai bupati dan walikota selama 5-10 tahun uang pensiun mereka hanya Rp1.200.000,- ini sangat miris sekali kasian sekali. Tolonglah Bapak Menteri, supaya pensiunan bupati dan walikota ini mereka berhubungan langsung dengan masyarakat, belum terjadi masalah sosial di kabupaten mereka masing-masing, benturannya sangat besar sekali dan ujung korupsi itu sangat dekat sekali oleh pejabat negara ini.

Selanjutnya Bapak Menteri, saya lihat di pejabat eselon I ini ada senior saya Mbak Arini dan Ibu Endang sudah menjadi Deputy, tapi ada keanehan di Kementerian PAN ini, contohnya Pak Ate, Pak Ate ini dulu beliau ini Kepala Inspektorat, tiba-tiba naik Deputy, hitungannya itu staf ahli dulu Pak Menteri tidak ada Deputy, dan beliau 1-nya baru kemarin 2014, begitu beliau Umroh staf ahli zamannya Pak Taufik Effendy, karena beliau pintar mungkin penampilan juga bagus langsung naik Deputy SDM jadi Sesmen. Banyak juga pejabat-pejabat Menpan teman-teman saya yang sudah 5 tahun eselon III, 5 tahun eselon IV sampai sekarang mentok, apakah karena tidak dekat dengan Pimpinan atau bagaimana ataupun kurang lobby, yang tesnya tinggi tidak ada jabatan, justru yang tesnya rendah malah dapat jabatan. Dan Pak Ate ini saya tahu persis, bawa orang-orang PPKP untuk ke Menpan staf-stafnya, ini yang saya tidak suka di Menpan ini, karena apa? Lebih baik kita berdayakan staf-staf Menpan, yang belum pintar kita pintarkan, berikan ilmu. Inilah titipan dari teman-teman saya di Menpan Pak Menteri, supaya Bapak Menteri lebih tahu masalah pengangkatan K2 ini bukan karena beban Pak Yudi saja, ada Pak Abu Bakar, ada Pak Mangindaan, Pak Taufik Effendy, kemana kemarin mereka tidak bisa mengangkat yang K2, sekarang diganti Pak Yudi, sekarang Pak Yudi harus menyelesaikan masalah honorer K2 ini. 3 menteri kemarin kemana kok tidak bisa menyelesaikan ini.

Jadi harapan saya kita dukung sama-sama program Pak Menteri dan bagaimana caranya sisanya 454 ribu orang honorer K2 ini untuk segera diangkat berdasarkan persyaratan yang sudah mereka miliki. Dan saya setuju honorer K2 ini yang diangkat ini benar-benar honorer yang bekerja kepada Pemerintah, karena mereka sudah banyak membantu Pemerintah. Dan honorer swasta untuk diangkat menjadi PNS tidak mungkin, masa seorang honor yang bekerja di swasta diangkat menjadi PNS ya tidak masuk akal, yang Pemerintah saja banyak yang belum diangkat. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Menteri. Bilamana ada kata saya yang salah Bapak Menteri, saya mohon maaf tapi semata-mata ini untuk perbaikan Bapak Menteri dan kami semua intinya mendukung kebijakan Bapak Menteri 5 tahun ke depan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

Yang terakhir ini mantan pegawai Menpan, kalau yang tadi adalah bupati dan seterusnya yang hafal sampai kepada pensiun bupati Rp1.200.000,- tapi pada waktu bupati pendapatannya juga berapa ya kan, iya inikan persoalan tersendiri.

Baik, mungkin ada di antara Pimpinan pada waktu kunjungan kerja mau menyampaikan beberapa hal 2 menit jika ada kami persilakan.

WAKIL KETUA (MUSTAFA KAMAL, S.S./F-PKS):

Terima kasih Bapak Ketua.

**Pimpinan yang kami hormati dan para Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati,
Bapak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati.**

Salam kenal juga dan mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dengan erat ke depan. Kebetulan kami Komisi II DPR RI kemarin melakukan Kunjungan Spesifik ke Jawa Timur, kalau tidak salah Bapak Menteri sebelumnya juga ke Jawa Timur ke Kota Surabaya dan mengunjungi ATM Samsat ini, ini karya anak bangsa yang luar biasa. Lalu saya tanya siapa yang buat, mana orangnya? Lalu dengan malu-malu karena orang Jawa dia datang ke depan ternyata mereka adalah satu tim, pimpinannya adalah bernama Donny tenaga honorer Pak. Mereka sudah bekerja menjadi Sub dari Samsat Jawa Timur ini sejak lama, mereka programmer dan membuat produk ini. Dan saya tanya teman-teman yang ikut pimpinan-pimpinan kepala daerah di masa lalu, di daerah-daerah yang lain belum ada. Lalu saya tanya kepada Donny apa yang anda cita-citakan? Dia bercita-cita menjadi PNS Pak, jadi cita-cita yang sederhana, saya tanya kenapa tidak jadi pengusaha saja, kalau anda punya produk ini, anda jaminkan patennya, ini berapa anda menjadi swasta yang maintenance saja produk ini sudah berapa biayanya. Tetapi dia tidak mau, dia hanya ingin jadi PNS katanya. Nah, persoalannya waktu itu ada Pak Mangindaan juga, apakah ada terobosan bagi anak-anak bangsa yang punya karya yang sudah nyata seperti ini dan rasanya ini tidak perlu di tes lagi produknya sudah ada. ada dulu atlet-atlet yang berprestasi menjadi PNS, apakah ada peluang bagi anak-anak bangsa tenaga honorer seperti ini yang bisa menjadi PNS.

Itu saja pertanyaan saya, karena ini janji tim kita ke Surabaya kemarin.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira Bapak Menteri bagaimana teknisnya untuk menjawab terserah lah, di mulai tadi apa yang terakhir dan pasti ada kesimpulan, jadi tidak usah pulang dulu, pasti ada kesimpulan rapat komisi ini. Kami persilakan Bapak Menteri, mungkin waktunya sebelum Magrib sudah kita akhiri kira-kira begitu.

MENTERI PANRB:

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak Pimpinan Komisi II DPR RI yang saya hormati,
Beserta seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati.**

Izinkan saya merespon beberapa hal yang sudah disampaikan tadi dan sebelumnya kami mengapresiasi setinggi-tingginya berbagai saran, masukan, juga kritik-kritiknya dan kami menerimanya sebagai itikad baik di dalam memperbaiki Pemerintahan bangsa dan negara kita ke depan. Kami dengan lapang hati menerima segala masukan dari Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat.

Ada beberapa area respon yang saya catat yang secara umum tadi disampaikan oleh ke-18 pandangan. Yang pertama terkait dengan terminology revolusi mental, kami sekedar menambahkan saja bahwa sasaran yang ingin dicapai dari revolusi mental adalah inti revolusi mental aparatur sipil negara, pertama adalah sebuah karakter yang non diskriminatif yang tanggap, yang bersih, jujur, melayani, disiplin, ramah, produktif, kreatif, kerja keras, gigih, korporatif, inovatif, gotong royong. Sasarannya adalah pelayanan yang berkualitas kepada publik untuk menghasilkan aparatur sipil negara menuju Indonesia

n. Turunannya memang banyak sekali yang akan kita lakukan. Ada 9 program percepatan reformasi birokrasi diantaranya adalah penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi aparatur sipil negara, penataan system seleksi dan promosi, peningkatan profesionalisme, pengembangan system pemerintahan elektronik, peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas aparatur, kesejahteraan aparatur dan efisiensi belanja aparatur negara.

Dari itu semua tentunya kita ingin memperbaiki aparatur sipil negara ini menuju satu penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia di masa yang akan datang yang sangat kondusif dan kompetitif terhadap percaturan ekonomi global melalui pelayanan yang terbaik dari seluruh sipil negaranya. Dan ini selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, bagaimana sebuah postur dari aparatur sipil negara ini dibentuk dan undang-undang tersebut juga dilahirkan dari tangan Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat.

Lalu kemudian mengenai Surat Edaran tentang penggunaan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan itu tentu didasarkan pada telaahan yang mendalam pada hasil laporan BPKP dan juga hasil temuan-temuan inspektorat. Kita tentu semuanya menyadari bahwa ini adalah era revolusi mental, di mana kita ingin memperbaiki cara berpikir, cara pandang dan perilaku aparatur sipil negara yang selama ini dalam pandangan masyarakat di nilai boros dan tidak efisien. Kita juga mengetahui bahwa gedung-gedung pemerintah yang dibuat adalah hasil jerih payah pemikiran Bapak dan Ibu sekalian Anggota Dewan yang terhormat tentunya. Anggaran yang dialokasikan adalah hasil jerih payah dari pendapatan yang dihimpun dari seluruh kegiatan rakyat yang diperuntukan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kami berpandangan bahwa inilah saatnya di era revolusi mental dan karakter ini mengembalikan fungsi pemerintahan di dalam penyelenggaraannya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintahan yang ada.

Sebagaimana kita maklumi juga bahwa hotel adalah sarana penunjang kegiatan pariwisata, pendukung peningkatan pendapatan asli daerah, oleh karenanya dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang kreatif dan dinamis untuk dapat lebih mengembangkan daerah dan mendukung sektor kepariwisataan. Kita juga mengetahui bagaimana pemborosan-pemborosan dan penyimpangan-penyimpangan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar fasilitas pemerintah. Ada 4.375.000 lebih PNS, ada 34 kementerian, ada 100-an lebih lembaga non kementerian, ada 508 lebih kabupaten kota, 34 provinsi, ribuan kedinasan yang apabila kita biarkan terus menerus tanpa ada sebuah aturan-aturan disiplin untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan akan menimbulkan pemborosan yang terus menerus. Dalam waktu 2 bulan saja Kementerian PAN menghentikan seluruh kegiatan di hotel sudah 4 miliar penghemantannya. Kementerian ESDM dalam waktu 2 bulan 15 miliar lebih, hasil simulasi penghitungan kami dari seluruh kementerian/lembaga dan daerah-daerah utama sudah mencapai 1,3 triliun. 1,3 triliun itu bila diperuntukan untuk membangun saluran irigasi bisa mencapai lebih dari 1000 aliran irigasi, bendungan sederhana separuh dari bendungan Waduk Jati Gede, jadi manfaatnya sangat besar sekali. dan SPJ yang dikeluarkan dari pemborosan ini juga cukup besar. Saya ambil contoh misalnya di daerah saya di Kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon, yang tinggal di Cirebon dan Kabupaten Cirebon itu jaraknya tidak sampai setengah kilo, tapi kenapa yang tinggal di Kota Cirebon senangnya rapat di Kabupaten Cirebon, karena SPJ-nya berbeda, SPJ di dalam kota tidak sampai Rp300 ribu, SPJ di luar kota bisa sampai Rp650 ribu dan ini dilakukan secara terus menerus, berbulan-bulan, berhari-hari melibatkan banyak sekali PNS kita. Begitu juga penggunaan hotel kami juga mendengarkan aspirasi dari PHRI dengan seksama, namun kami juga mendapatkan laporan-laporan dari para manajer hotel mereka juga kesulitan menghadapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PNS atau ASN kita. Hotel yang digunakan 50 tetapi mereka harus menandatangani 100 kamar, orang yang seharusnya datang 100 tetapi yang ngisi absen 200, kegiatan seharusnya 3 hari baru pembukaan sorenya sudah kosong, dan laporan-laporan ini kami akumulasikan dalam bentuk laporan-laporan yang kami terima dari berbagai macam sumber. Sehingga dalam konteks revolusi mental ini kita ingin mengembalikan kewibawaan aparatur sipil negara, mengembalikan kepercayaan rakyat bahwa uang yang diberikan oleh rakyat kita gunakan sebaik-baiknya untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Kami juga melakukan peninjauan-peninjauan kepada instansi-instansi pemerintah dan kita melakukan audit terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah dan itu masih sangat memadai. Bapak Presiden juga memberikan instruksi untuk stop melakukan pemborosan, melakukan efisiensi dan melakukan kerja lintas sektoral. Memang ada daerah-daerah pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki fasilitas tetap dengan lintas sektoral seluruh gedung-gedung yang dibiayai oleh APBN bisa dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, misalnya di Kota Bandung tidak memiliki gedung dengan kapasitas melakukan rapat 200 orang ada di Gedung Sate di tingkat provinsi, provinsi tidak cukup ada Gedung LAN,

n Polri tidak cukup ada Secapa Angkatan Darat. Jadi seluruh untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah.

memang dalam waktu dekat ini menyulitkan hotel-hotel yang belum memberikan point, tetapi kita akan kembali lagi pada jalurnya dan kita meyakini bahwa sebuah kebijakan itu tidak bisa menyenangkan semua orang, sebuah kebijakan tentu ada yang tidak diuntungkan, tetapi kami meyakini kebijakan ini akan baik bagi peningkatan disiplin aparatur sipil negara sebagaimana harapan masyarakat. Begitu juga dengan surat edaran tentang kesederhaan PNS, kami menyadari menjadi birokrat ini adalah bukan keterpaksaan, birokrat ini harus merakyat dalam konteks revolusi mental kita harus bisa merubah mainset birokrat untuk tampil dengan sederhana.

Kita bisa menyadari di Jakarta saja yang paling gampang, kalau ada pejabat yang menikahkan anaknya kita harus antri salaman 2 jam, untuk mencari tempat parkir sampai 1 jam, Polisi yang harusnya beristirahat di hari Sabtu dan Minggu harus bekerja, rakyat hanya bisa menonton ratusan atau ribuan kendaraan hilir mudik tanpa bisa menikmati acara-acara yang diselenggarakan oleh pejabat. Tentu ini akan membuat jarak antara pejabat dan rakyatnya. Oleh karenanya, di era revolusi mental ini kita ingin mengembalikan cara pandang, cara pikir dan cara berlaku bahwa pejabat itu harus merakyat, pejabat itu harus berempati dengan kepentingan rakyat, sehingga kalau dia menjadi pejabat sudah harus tahu dengan konsekuensinya harus lebih merakyat. Kami membatasi undangan tertulis 400 dan juga untuk kehadiran kurang lebih 1000 orang. Dengan demikian tidak dibutuhkan geung-gedung yang mewah, gedung-gedung yang besar, sovernir yang berlebihan dan kemacetan yang mengganggu lalu lintas dan rakyat. Ini berlaku apabila resepsi tersebut diselenggarakan di tempat-tempat umum untuk semakin memberikan rasa penghormatan dan simpati di rakyat. Kami meyakini dan mensimulasikan ini dan kami sudah melaakukan evaluasi ini salah satunya misalnya Wakil Gubernur Kepri yang sedianya akan melakukan resepsi besar-besaran 4000 orang dia sederhanakan, dia lakukan dengan sederhana di rumahnya silakan, kalau kegiatannya di rumah kita tidak bisa menolak rakyat yang mau datang, tetapi kalau kegiatan resepsi seorang pejabat di hotel-hotel berbintang, hotel mewah yang datang dengan kendaraan yang mewah dan rakyat hanya bisa menonton tentu ini akan memperpanjang jarak antara birokrat dengan rakyatnya. Begitu juga Kadid Propam Mabes Polri yang sudah menyaipkan kegiatan pesta yang besar, tetapi dengan adanya himbauan ini beliau menyelenggarakan pesta yang sederhana, walaupun dihadiri dengan banyak orang, masjid-masjid menjadi ramai, tempat-tempat gedung pertemuan menjadi ramai, dan ini tentu baik dilihat oleh masyarakat.

Jadi dengan segala hormat saya kepada Anggota Dewan yang terhormat, kami sudah mengevaluasi kebijakan ini dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya, kami mohon maaf akan terus melanjutkan kebijakan ini, karena kami meyakini inilah yang diinginkan oleh rakyat di era revolusi mental ini.

Kemudian yang terkait dengan masalah CPNS, perlu kami informasikan bahwa sampai dengan 2012 instansi-instansi itulah yang menentukan diterima atau tidak diterima dalam kaitannya dengan honorer. Setelah 2012 memang ada panitia seleksi nasional, ada keterlibatan pusat di dalam mengawasinya, tetapi kalau misalnya ada tenaga-tenaga honorer yang tercecer K1 atau K2 sampai dengan 2012 seharusnya instansi-instansi apakah di tingkat pusat atau daerah bertanggungjawab kenapa sampai bisa tercecer.

Lalu kemudian terkait dengan moratorium kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat dan kami akan memperhatikan bahwa moratorium ini bukan dengan selektif dan dengan melihat kebutuhannya. Mungkin *zero growth* di mana ada yang pensiun, ada yang diisi itu adalah keseluruhan kebijakan yang moderat yang bisa kami ambil, karena dengan moratorium ini kita ingin melihat di tempat atau wilayah mana kelebihan sumber daya manusia, ASN di tempat mana yang kurang, jabatan fungsional apa yang kurang dan di mana yang berlebih. Dengan demikian pendayagunaan aparatur sipil negara ini bisa secara optimal ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut, termasuk juga untuk wilayah-wilayah daerah otonomi baru tentu pengadaan aparatur sipil negara tetap berlangsung sekali pun dalam prosesnya ada perbantuan dari wilayah asalnya.

Lalu yang terkait dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, open recruitment ini merupakan sebuah persyaratan. Jadi setiap pergantian dan pengangkatan pejabat itu harus dilakukan secara terbuka melalui seleksi yang terbuka dan adanya panitia seleksi, itu adalah amanat undang-undang. Dengan adanya amanat undang-undang ini maka tidak memungkinkan lagi adanya sebuah proses rekrutmen tanpa seleksi. Namun demikian, hal-hal yang terkait dengan K2 tadi memang memerlukan sebuah atensi khusus.

Lalu dalam kaitannya dengan pertanyaan sahabat saya dari Hanura tadi khusus di Kementerian PAN kami menjamin di era pemerintahan Pak Jokowi ini tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan CPNS, saya menjamin sepenuhnya, bahkan tidak ada satu pun titipan lewat menteri baik itu dari Pimpinan Parpol atau darimana pun dari kolegal pejabat yang saya tindak lanjuti sebagai

Kementerian Menpan yang berani melakukan penyalahgunaan NIS maupun pola perekrutan penomoran NIP daripada tenaga honorer. Kami bisa pastikan 99,9% Kementerian PAN bersih dari penyalahgunaan wewenang dalam proses CPNS. Kalau ada bukti-bukti mengenai hal tersebut silakan sampaikan kepada kami, berikan faktanya dan kami akan ambil tindakan yang keras dalam 1X24 jam.

Kami menjunjung tinggi gerakan anti korupsi, kami juga menolak segala bentuk gratifikasi dan saya sendiri sebagai pembantu Presiden diberikan amanah untuk memberikan poros dari perubahan reformasi birokrasi ini mengawal dengan seksama, sepenuh hati dan sebenar-benarnya. Saya berterima kasih sekali kalau Bapak dan Ibu sekalian memiliki data dan informasi mengenai perilaku atau penyalahgunaan wewenang dari pejabat aparatur sipil negara di mana pun berikan datanya kepada kami pasti akan kami tindaklanjuti dan tanpa pandang bulu.

Lalu kemudian yang terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara, kami bukannya tidak serius untuk memasukan anggaran K2 ini. Sebagaimana kita maklumi bahwa APBN 2015 ini sudah disusun sebelum pemerintahan Bapak Jokowi dan ruang fiskal untuk APBN Perubahan 2015 ini pun waktunya sangat terbatas dan tidak begitu leluasa untuk mengatur ini. Oleh karenanya, mohon dimaklumi jangan dilihat bahwa kami tidak memiliki komitmen untuk menganggarkan masalah K2 ini, karena memang ruang fiskal dan waktunya pun sangat sempit. Namun demikian, 454.683 K2 yang tidak lulus ini tentu Kementerian PAN dan Komisi II DPR RI akan duduk bersama kembali merumuskan dengan memperhatikan berbagai saran-saran yang dikemukakan oleh Anggota Dewan yang terhormat ini. Tadi ada saran dari Bapak Tagore, ada saran dari Bapak Luthfi, ada saran dari rekan-rekan yang lain karena segala sesuatu yang kita putuskan ini harus memiliki landasan konstitusi, harus ada dasar-dasar hukumnya. Kami dari Pemerintah tidak ingin dianggap melanggar ketentuan undang-undang yang kita buat bersama. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa segala ketentuan mengenai hal yang kita bicarakan ini sudah sangat jelas, yang diperlukan sekarang ini adalah kebijakan kita. Saya selaku pembantu Presiden di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sangat memperhatikan saran-saran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang terhormat ini dan saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh saudara-saudara honorer dan saya sangat mengerti apa yang dirasakan. Saya secara pribadi dan kelembagaan sudah menerima perwakilan-perwakilan honorer ini, sudah berdialog dan kami juga sedang menyiapkan formulasi penyelesaiannya dan kalau dari DPR RI ini meminta dalam tempo dan waktu sesingkat-singkatnya menyelesaikan kami tentu akan menyambut gembira mari kita hitung bersama-sama berapa waktu untuk menyelesaikan proses menyelesaikan ini yang tidak menyulitkan kita semua dengan mempertimbangkan aspek yang luas. Tentu pertimbangan-pertimbangan yuridis, pertimbangan-pertimbangan finansial dan juga pertimbangan kemanusiaan. Kalau dari pertimbangan-pertimbangan legal saya rasa Anggota Dewan Komisi II DPR RI ini sudah paham, tetapi dari pertimbangan kemanusiaan dan tapasalira kita atas nasib yang dialami dari rekan-rekan honorer itu juga menjadi bagian yang kita pertimbangkan. Saya paham apa yang menjadi aspirasi dari Anggota Dewan yang terhormat ini, karena kita juga pernah sama-sama menjadi wakil rakyat, jadi saya tahu bagaimana harus memperjuangkan ini dan saya bisa merasakan apa yang dirasakan rekan-rekan honorer menunggu dengan ketidak pastian, Insya Allah di pemerintahan Bapak Jokowi ini kita pastikan bahwa masalah ini akan segera kita selesaikan.

Selanjutnya saya persilakan saudara Ketua Kepala BKN untuk menambahkan hal-hal yang terkait dengan masalah K2 dan kepegawaian kita, lalu ditambahkan mengenai kebijakan SDM Aparatur, lalu terkait dengan masalah pengawasan Pak Ate, saya sampaikan juga bahwa seluruh deputi yang ada di Kemenpan ini direkrut melalui open...jadi tidak benar kalau main tunjuk. Jadi kementerian pertama yang melaksanakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah Kementerian PAN dan kita melakukan reformasi dari 7 deputi menjadi 4 deputi, dari 4 deputi semuanya diseleksi secara terbuka, instansi lain belum ada, kita melanjutkan proses ini. Jadi Pak Ate nanti melanjutkan hal-hal terkait dengan nomenkatur Ibu Rini, kebijakan publik, pelayanan publik nanti Ibu Mira mohon diselesaikan sebelum jam 6 dan saya mohon izin untuk Sholat Ashar sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Lanjut Pak Eko.

SESTAMA BKN (EKO):

Terima kasih Ketua.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Beberapa hal yang sifatnya kebijakan saya kira sudah disampaikan oleh Menteri secara lengkap. Hal-hal yang terkait dengan CPNS ada dua hal yang dilaksanakan saat ini, yaitu berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2012 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer K2 dan pengangkatan dokter khusus dan juga pengangkatan tenaga ahli khusus.

Saya laporkan bahwa untuk tenaga honorer K2 dari 650 ribu setelah dilakukan tes pada tahun 2013 yang lulus sekitar 200 ribu dan sekarang pada proses pemberkasan penetapan NIP. Namun demikian, sesuai dengan PP yang berlaku yaitu PP Nomor 56 Tahun 2012 semestinya tenaga honorer K2 ini sudah harus selesai pada akhir tahun atau bulan Desember 2014, tetapi ternyata masih ada beberapa daerah yang tenaga honorer yang sudah ikut ujian dan dinyatakan lulus tapi sampai saat ini juga belum mengajukan pemberkasan penetapan ke BKN. Hal ini juga barangkali terkait dengan kelengkapan dokumen para peserta yang belum lengkap dan juga keengganan bupati, walikota terkait dengan harus menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap kebenaran tenaga honorer K2 tersebut. Sebetulnya tenaga honorer K2 ini yang menjadi masalah krusial adalah kualitas data tenaga honornya, karena kita tidak memiliki data yang akurat betul. Untuk itu maka untuk menjamin tenaga honorer ini akurat salah satunya dengan melakukan tes. Pada saat pendataan honorer K2 diumumkan diuji publik seluruh masyarakat tidak ada gejala jumlahnya 650 ribu, tetapi begitu tes dan yang lulus 200 ribu mulai ada gejala, ada laporan ini palsu, ini bodong dan sebagainya dan itulah sebagai instrument BKN untuk melakukan pencegahan untuk mengaduan-pengaduan. Ini juga jumlahnya signifikan, sebagai contoh ada 2 orang yang sama-sama tenaga honorer bodong pada saat diumumkan data basenya sebagai uji publik sama-sama tersenyum karena datanya masuk dua-duanya, tetapi begitu ujian dan satu dan satu tidak lulus baru terjadi masalah dan lapor melapor itulah yang kita gunakan untuk memperbaiki data.

Bapak/Ibu dan saudara-saudara sekalian,

Untuk tenaga honorer K2 yang belum kita tetapkan NIP-nya juga hampir diseluruh kabupaten di Papua dan Papua Barat dan ini juga barangkali nanti perlu kebijakan khusus dari kementerian terkait dengan waktu yang sudah habis tentang berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya yang kedua, yang kami laporkan adalah seleksi CPNS secara umum tahun 2014 yang difasilitasi dengan komputer test seluruhnya berjalan dengan baik, tidak ada gejala dan masyarakat menerima dengan baik karena hasil seleksi, hasil tes diketahui saat itu juga, begitu selesai tes peserta sudah tahu lulus lewat atau tidak, masyarakat bisa mengikuti semua, sangat transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dan itu sudah berjalan dengan baik, sekarang pada proses pengumuman dan juga pemberkasan untuk penetapan NIP di BKN.

Saya kira itu secara garis besar yang dapat kami laporkan terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis untuk masalah-masalah kepegawaian baik K1 maupun tes secara umum.

Untuk mendukung program pemerintah di bidang peningkagan kesejahteraan melalui kesehatan, diangkat dokter secara langsung tidak melalui tes, yaitu untuk dokter spesialis bisa diangkat di rumah sakit kabupaten/kota itu jumlahnya juga signifikan dan untuk dokter bisa diangkat secara langsung di Puskesmas terpencil termasuk dokter gigi juga. Nah, dari daftar yang ada sekitar 5000 sudah ditetapkan formasinya dan 4000 orang sudah ditetapkan NIP-nya. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu daerah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga pelayanan kesehatan.

Saya kira itu beberapa hal yang kami laporkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Apa tambahan sebelum Bapak menteri datang?
Pak Deputy ya?
Silakan.

DEPUTI KEMENTERIAN PANRB:

Terima kasih.

Bapak Ketua Komisi II DPR RI yang saya hormati dan saya banggakan, Serta seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati.

Barangkali saya sedikit akan menjelaskan postur dari pegawai ASN ini Pak, jadi dari 4,37 juta seluruh pegawai ASN kalau dulu namanya pegawai PNS. 45% adalah profesi guru Pak, kemudian 40% adalah jabatan fungsional umum, jabatan fungsional umum yang tidak terlalu jelas posisinya disebelah mana, sisanya adalah medis, paramedic dan jabatan fungsional tertentu yang kita namakan jabatan fungsional yang professional, posisinya adalah demikian.

Nah, barangkali kita ingin mengubah jadi jabatan fungsional umum yang kurang jelas itu harus jadi professional. Namun Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat pemetaan di seluruh Indonesia Pulau Kalimantan, kemudian Pulau Papua dan Maluku rata-rata pegawai ASN pendidikannya adalah masih setingkat SLTA, sedangkan Pulau lainnya sudah sarjana. Nah, ini sebetulnya yang kami khawatirkan ketika menghadapi masyarakat ekonomi Asean, 11 negara tenaga kerja akan pulang pergi ke Indonesia dan kita pun sebagai regulator barangkali di sisi PNS atau pegawai ASN kita harus kuat.

Oleh karena itu, kami dari Kemenpan dan RB tentu saja bagaimana sekarang kita menyiapkan SDM yang handal, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang beberapa tadi Bapak Menteri terlewat kaitannya penguatan KSN, Pak Luthfi kami setuju Pak jadi KSN ini memang harus kuat karena KSN ini adalah lembaga yang menjamin system...kemudian tadi disebutkan bagaimana KSN untuk menjangkau daerah. KSN ini mempunyai tangan, yaitu asisten KSN, asisten KSN yang membantu komisioner dan juga nanti akan bekerjasama dengan Kanrek-Kanrekk BKN, jadi yang berada di seluruh wilayah nusantara ini. Ini adalah yang membuat bagaimana kita bisa menggerakkan KSN ini untuk ke seluruh wilayah nusantara ini.

Kemudian keputusan KSN ini adalah sifatnya sangat mengikat, jadi manakala memang direkomendasikan bahwa misalnya ada daerah yang tidak...itu adalah betul-betul harus diperbaiki. Jadi saat ini KSN sudah bekerja dan beberapa kasus di daerah misalnya ada pengisian jabatan yang betul-betul tidak...karena ditunjuk dengan semena-mena dan lain sebagainya itu betul-betul harus ada komitmen dari bupati dan harus dicek kembali seluruh kompetensi pejabat yang ditunjuk apakah betul-betul kompeten atau tidak, kalau tidak itu semua harus dirubah lagi. Jadi mekanisme ini kemarin ini sudah dilakukan.

Kemudian berikutnya lagi bahwa kami sepakat dan setuju bahwa di dalam amanat Undang-Undang ASN bahwa seluruh pegawai ASN ini dianggap sebagai asset. Oleh karena itu, di dalam amanat Undang-Undang bahwa diklat, sekolah, magang dan lain sebagainya itu adalah menjadi hak pegawai ASN.

Bapak dan ibu sekalian,

Bahwa training rate pegawai ASN atau PNS ini sangat luar biasa jarang nya saat ini, bisa sampai dengan 1 kali dalam 20 tahun, ini rata-rata untuk nasional. Oleh karena itu, inilah yang harus diperbaiki dalam Undang-Undang ASN ini.

Kemudian tentu saja bahwa ini berimbas kepada LAN (Lembaga Administrasi Negara), LAN harus mempunyai metode bagaimana training ini harus lebih baik lagi, kurang lebih seperti itu. Jadi hal-hal yang tadi kemudian kaitanya dengan mutasi yang semena-mena di dalam Undang-Undang disebutkan bahwa minimal 2 tahun dia tidak boleh diganti sejak pelantikan dan maksimal 5 tahun, setelah 5 tahun harus diuji kembali. Apabila memang dibutuhkan kompetensinya layak dan lain sebagainya itu bisa diperpanjang, tetapi kepala daerah tidak boleh mengganti minimal 2 tahun pegawai ASN ini, kecuali karena kinerjanya atau ada kasus itu boleh kurangi 2 tahun tetapi kalau tidak ada alasan itu tidak boleh. Jadi hal-hal itu yang memang menjadi rambu-rambu yang di dalam Undang-Undang ASN sudah berjalan.

Kemudian yang terakhir, ada formasi khusus jadi untuk atlet yang berprestasi mereka di tes sesama atlet yang berprestasi, apa katagori atlet yang berprestasi misalnya pemenang medali di Olimpiade

kesempatan sesama mereka. Kemudian disabilitas pun diberikan kesempatan tes, kemudian putra dan putri yang cumlaude di seluruh nusantara ini yang di universitas yang berakreditasi A betul-betul yang diberikan kesempatan dan sesama yang cumlaude mereka dites juga silakan untuk bergabung menjadi pegawai ASN. Kemudian sarjana mengajar di tempat terpencil, terluar, terdepan itu pun diberikan kesempatan, dan yang terakhir formasi khusus putra dan putri Papua yang semuanya itu ditempatkan di kementerian dan lembaga supaya mereka mempunyai pengalaman secara nasional.

Jadi kurang lebih bahwa inilah variasi-variasi dari calon pelamar umum tetapi ada formasi khusus untuk group-group tadi.

WAKIL KETUA (H. MUSTAFA KAMAL, S.S/F-PKS.):

Yang punya karya yang dia bisa bikin ATM Samsat ini.

DEPUTI KEMENTERIAN PANRB:

Sejauh ini barangkali asal masuk katagori diantara itu dia bisa, tetapi kita akan buka lagi yang berprestasi, barangkali prestasi yang bagaimana lagi nantinya.

WAKIL KETUA (H. MUSTAFA KAMAL, S.S/F-PKS):

Tidak diukur dengan akademik tetapi dengan karya nyata dan sudah aplikasi.

DEPUTI KEMENTERIAN PANRB:

Kalau yang ini kita pertimbangkan dengan sangat nanti saya cari datanya anak ini saya pernah lihat kesana.

KETUA RAPAT:

Masih ada yang perlu ditambahkan?

Ini sudah mau Magrib kita putuskan atau kita skors kita lanjutkan nanti jam 19.00 WIB, inikan waktu sudah mau Magrib.

F-PD (LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., S.H., M.H.):

Pimpinan, maaf saya cuma mau klarifikasi pembicaraan menteri tadi.

Tadi dia ambil sample di Bandung, sedangkan di Papua kantor-kantor semua itu pada tidak ada semua itu. Jadi kalau misalnya bicara...jangan bicara hal-hal yang samplanya yang di Jawa saja, saya kira anda harus ke Papua dan lihat kondisi di sana bahwa tidak ada hotel dan tidak ada kantor di sana itu. Jadi ini klarifikasi saja Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada tambahan lagi?

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.):

Tadi terkait implikasi dari kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat politis, saya tertarik dengan pernyataan dari deputi tadi ada syarat yang mengikat. Aturan memang tertulis selama 2 tahun belum boleh dipindah, itu teorinya tetapi prakteknya Bapak Menteri bisa datang ke tetangga sebelah di Kabupaten Brebes banyak sekali di sana, cek di situ banyak pimpinan dinas yang dipindah, ada Kepala RSUD yang dijadikan fungsional biasa, kemudian ada juga Kepala Kabid dari Dikdasmen kalau tidak salah dijadikan

kita kunjungan spesial.
Terima kasih.

merintah lain dan Alhamdulillah di sana diangkat lagi kecuali
lagus tetap implementasinya yang perlu dicek. Kalau perlu nanti

MENTERI PANRB:

Ketua, izin saya tanggapai Ketua.
Ini kami tindaklanjuti segera Ketua, kami akan tindaklanjuti kalau perlu bersama-sama dengan Tim
Pengawas Reformasi Birokrasi.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira dapat kita simpulkan.
1. Komisi II DPR RI...(suara tidak jelas)

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Sebentar Pimpinan, yang nomenklatur tadi bagaimana belum dijawab.

KETUA RAPAT:

Nomenklatur yang kementerian.

DEPUTI KEMENTERIAN PANRB (RINI):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Yandri terima kasih tadi pertanyaannya, jadi sebetulnya ada 13 kementerian yang mengalami pergeseran fungsi dan mengalami penggabungan. Nah, Kementerian PAN kemarin sudah menyelesaikan rancangan Perpres bersama-sama dengan seluruh menteri untuk mendesain ulang terhadap 13 menteri tersebut untuk disesuaikan dengan *outcome* dari masing-masing kementerian. Nah, kami mendesain organisasi, membantu mendesain organisasi untuk kementerian itu tidak melihat dia sebagai kementerian dia sendiri tetapi kita harus melihat bahwa setiap urusan pemerintahan merupakan suatu sun system daripada urusan pemerintahan yang lain. Dengan demikian, kami juga mencoba memperbaiki bisnis proses dari masing-masing urusan pemerintahan yang mengalami *cross cutting issue*, jadi kita sekaligus memperbaiki semua mekanisme prosesnya.

Sudah di meja Presiden dan nampaknya dalam waktu dekat untuk yang 13 kementerian dan lembaga ini sudah bisa ditetapkan organisasinya, bahkan untuk sementara sambil menunggu Perpres untuk masing-masing kementerian sudah diterbitkan Perpres Nomor 165 yang kita katakan sebagai Perpres transisi. Jadi dia selama ini belum selesai ditentukan menteri-menteri mana yang bertanggungjawab terhadap fungsi pemerintahan dengan tujuan supaya setiap fungsi-fungsi pemerintahan tidak berhenti. Ada di sana bagaimana mekanisme di dalam Perpres 165 dan ini saya kira sudah berjalan dengan baik dan kita sudah menyelesaikan seluruh yang sudah selesai yang 13 kementerian dan sekarang kita bergerak lagi yang 21 rancangan Perpres lagi dan untuk kementerian yang memang tidak mengalami perubahan tetapi harus disesuaikan dengan strategi dari Presiden Jokowi.

Itu saja yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih.

Bapak Pimpinan, nanti kalau masih ada hal-hal yang sifatnya informative yang diperlukan oleh Anggota Dewan yang terhormat kami siap terbuka bisa diakses kapan saja barangkali ada informasi-informasi lain maupun masukan-masukan baru dengan senang hati.

Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami kembalikan kepada Pimpinan.

F-NASDEM (DR. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si):

Interupsi Pimpinan, sebentar Pimpinan, mohon izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini masalah apa lagi.

F-NASDEM (DR. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si):

Ini mengenai hot line antara.... dulu pada waktu Mendagri datang kesini itu seluruh nomor telepon eselon I diserahkan ke kita, apakah itu juga bisa berlaku di sini.

Terima kasih.

MENTERI PANRB:

Boleh Pak, kami serahkan nanti Pak.

KETUA RAPAT:

Itu tadi yang kam minta sebelum diinterupsi untuk ke depan, makanya kesimpulannya ada kita harus lakukan komunikasi yang baik. Jadi saudara-saudara yang kita hanya di bawah memang ini ngeri ini urusan birokrasi kita, terus terang ini sebentar lagi mungkin sudah mau Magrib. Yang di bawah apa yang kita diskusi kita harus mengawasi dan kita lakukan komunikasi yang baik dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Kesimpulan rapat hari ini adalah:

1. Komisi II DPR RI menerima, memahami dan mendukung rencana strategis Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 agar dapat tetap menjaga program kerja berjalan pada jalurnya, Komisi II DPR RI akan tetap mengawasi jalan dan rencana di maksud sampai pada penerimaan PNS. Oleh karena itu Komisi II DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk tetap membangun komunikasi yang baik.

Jadi kalau ada kebijakan daripada Pak Menteri tidak ada kutib mengutib, kita atasi ini, Komisi II DPR RI mengawasi dan jika ada bukti apalagi dari Kantor Menpan. Oleh karena itu Komisi II DPR RI dan Pemerintah bersepakat untuk tetap membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang baik ini Saudara Menteri dan jajarannya mohon nomor kontaknya kita 24 jam.

Setuju ini?

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi II DPR RI mendoong revolusi mental birokrasi, dilaksanakan secara structural dan kultural. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi menjadi motor terlaksananya revolusi mental di kalangan birokrasi terutama dari pejabat dan pimpinan tinggi.

Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

penyederhanaan, kalau di kampung saya Pak Menteri untuk
unganya saja bisa 7 kilo meter, jelasnya di Sumatera Utara Pak
EKO, nanti Pak Ramli dari mana Sumatera Utara. Itu makanya saya katakan ngeri kalau bicara birokrasi itu.

3. Komisi II DPR RI mengapresiasi terobosan-terobosan di lingkungan birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Komisi II DPR RI meminta agar terobosan-terobosan tersebut dilakukan secara konsisten.

Itu tadi semangatnya, saya kira jangan tidak konsisten terobosan, tadi sudah angina sampai di interupsi yang terakhir Pak Luthfi dan Pak Agung ini mantan bupati semua ini. Jadi Komisi II DPR RI sekarang mantan bupati, saya tidak mantan bupati tapi ini mantan walikota juga ada sebelah kiri saya. Jadi terobosan itu kita lakukan secara konsisten, kalau saudara menteri mengatakan itu dipindah-pindah nanti akan ada aturannya. Ini saya katakana di kampung saya balikin, 6 bulan camat itu bisa diputar-putar, kepala sekolah bisa diputar-putar saudara menteri, karena ada hak nilainya di situ.

Jadi ini saya katakan ngeri tadi, jadi tunggu saja dulu itu kesimpulannya belum masuk, jadi tidak usah tegang-tegang kita ngurusin republik ini. Setuju ini ya secara konsisten?

(RAPAT : SETUJU)

4. Komisi II DPR RI mendukung penuh upaya.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Pimpinan, sebentar Pimpinan.
Ini saya mau interupsi ini untuk point yang ke-3.

KETUA RAPAT:

Ya, ada tambahan.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Secara konsisten selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, ini penting loh Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, ditambahkan ya yang point 3, "Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

4. Komisi II DPR RI mendukung penuh upaya reformasi manajemen aparatur sipil negara yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi serta mendorong Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

Yang kami langsung tadi nyatakan belum ini harus semua secara lengkap. Dapat disetujui ya?

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si):

Sebentar Pimpinan, saya kira selama inikan kita membuat Undang-Undang itu antara Pemerintah sama Komisi II DPR RI misalnya ASN, mengenai peraturan-peraturan turunan itu kadang-kadang tidak terkoordinasikan dengan baik Pimpinan. Nah, terhadap aspirasi yang berkembang tidak termaktub dalam peraturan turunan itu. Nah, saran saya sebenarnya kalau tidak menjadi aturan dan Bapak Menteri bisa berkenan setiap peraturan turunan itu sebaiknya dikonsultasikan minimal kita diinformasikanlah untuk

P sudah beredar kita juga tidak tahu, ditanya sama konsituen dahal Undang-Undang itu kitalah yang menjiwai.

Jadi saya usul di point 4 itu kalau bisa itu dikonsultasikan atau diinformasikan atau diajak bicara kira-kira begitu bahasanya saya tidak ngerti saya, koordinasi atau apalah, jadi intinya jangan kita ini membuat Undang-Undang tapi turunannya kita tidak ngerti.

MENTERI PANRB:

Saran Pimpinan, mungkin bahasanya dikomunikasikan dengan Komisi II DPR RI.

KETUA RAPAT:

Ya, bahasanya memang harus dikomunikasikan karena PP, Perpres, perundang-undangan kita adalah tanggungjawab daripada Presiden, eksekutif dan oleh karena itu dikomunikasin dengan Komisi II DPR RI ditambah saja bahasanya.

Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah agar kebijakan moratorium ditinjau ulang dengan mendasarkan pada data yang valid dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.

Setuju ya?

F-PG (AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si):

Pimpinan, kalau boleh bahasanya dikajii ulang.

KETUA RAPAT:

Dikaji ulang bukan ditinjau ulang, beda-beda tipis sajalah.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Saya dikit saja Pimpinan, tambahkan untuk point 5 ini dikaji ulang oke tetapi kan tadi Pak Menteri sudah sampaikan untuk di Daerah Otonomi Baru itukan diperkenankan untuk menerima. Nah, artinya mungkin dipertegas juga itu terkecuali untuk DOB diperbolehkan untuk merekrut PNS sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Mungkin perlu itu, karena kalau tidak ini sebanyak 20 DOB kemarin bisa ragu mereka untuk merekrut atau apakah ada Surat Edaran Menteri tentang khusus DOB saya tidak tahu ini.

MENTERI PANRB:

Izin Pimpinan, kenapa kami meminta untuk dikaji ulang karena memang sudah ada Surat Edaran Menteri sebelumnya yang menindaklanjuti arahan instruksi dari Presiden mengenai jabatan-jabatan fungsional mana saja yang memang dikecualikan dalam moratorium. Jadi Daerah Otonomi Baru ini termasuk dikecualikan untuk kebutuhan khusus, sudah ada itunya. Jadi dengan dikaji ulang kami masih bisa berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI.

KETUA RAPAT:

Saya kira cocok saja dengan kondisi masyarakat, dikaji ulang sesuai dengan kondisi masyarakat. Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Ini kemajuannya sudah hebat, jadi moratorium itu dikaji ulang lagi.

tidak lulus, Komisi II DRPR RI meminta kepada Kementerian untuk segera memberikan sikap yang tegas dan disertai dengan solusi dan kebijakan yang bersifat aplikatif dan selesai di tahun 2015.

Nanti Saudara Menteri usulnya tadi tidak usah dikesimpulan ini sudah, tadikan saran Saudara Menteri kita duduk sama-sama. Oleh karena itu, nanti Komisi I DPR RI akan tentu menindaklanjuti, kita kan komunikasi sudah baik kita duduk bersama-sama, tidak usah duduk kita putuskan ada Panja. Nanti dalam perjalanan berikutnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu duduk sama-samalah.

F-NASDEM (DR. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si):

Saya mohon di point 6 ini dimasukkan sanksi terhadap K2 yang tidak memenuhi tetapi sudah diproses, itu yang pertama. Yang kedua, sanksi terhadap pejabat yang membuat orang itu menjadi K2, harus dimasukkan di sini, supaya kita ini bernegara jangan main-main. Kita sendiri yang buat aturan, kita sendiri yang melanggar aturan itu, jadi perlu ada sanksi ini Pak Menteri. Mengenai kalimatnya saya tidak tahu tetapi 2 point itu harus ada sanksi orang yang sudah dinyatakan lulus tetapi sebenarnya tidak memenuhi syarat harus diberikan sanksi dan orang yang membuat orang itu menjadi lolos juga dikasih sanksi.

Terima kasih Pak.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Pimpinan sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Yandri.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Saya mungkin bisa menyambung Pak Luthfi, tetapi yang saya mau sampaikan Pak Menteri mohon maaf tadi saya menyimak tentang tanggapan Pak Menteri terhadap honorer K2 ini. Tadi ruang fiskal yang tidak memungkinkan, menurut saya kurang tepat Pak Menteri, karena terobosan Pak Menteri menghemat biaya rapat-rapat sampai 1,3 triliun sebaiknya sebagian dikasih kepada mereka tidak masalah menurut saya. Jadi intinya beginilah, Komisi II DPR RI Pak Menteri siap kalau perlu kita berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, menteri-menteri terkait. Kita tidak minta Pak Menteri kerja sendirian tidak, jadi kalau masalah keuangan, masalah administrasi, masalah yang lain saya kira itu bisa kita bicarakanlah. Memang waktu tinggal sedikit, APBNP sebentar lagi akan dibahas. Menurut saya Komisi II DPR RI Pimpinan, mesti memasukkan itu teman-teman Banggar Komisi II DPR RI memasukkan itu, memperjuangkan itu. Dan kalau perlu saya memang tidak setuju 180 miliar terlalu kecil untuk Menpan.

Jadi jangan khawatir kalau kita mem-back up kerja Menteri ini seolah bisa berhasil. Nah, saya kurang setuju Pak Menteri, kalau ruang fiskal itu menjadi kecil untuk mereka. 1,3 triliun itu luar biasa menurut saya, jadi inikan menyangkut manusia juga revolusi mental juga menurut saya. Jadi saya paham kendala, rentetan nanti banyak terhadap gaji mereka. Nah, inikan menyangkut warga negara kita juga, jangan mereka sampai kerja tidak kita hargai. Maksud saya gini Pak Pimpinan, yang ke-6 itu mesti agak tegas juga kita, jadi kita tambahkan "komisi II DPR RI dan Menpan akan membahas anggaran khusus untuk penyelesaian terhadap tenaga K2". Nah, kalau itu masuk ini menjadi payung Komisi II DPR RI dan Menpan beserta Menteri Keuangan. Kalau tidak kan kita juga tidak akan selesai masalah ini, jadi konkrit bukti kita kalau mau mem-back up mereka terbukti dalam anggaran, kalau ini hanya kata-kata saja.

Termasuk kalau Pak Lutfi tadi mungkin itu menyangkut nama baik orang juga, mungkin kalau pun mau kita bahas menurut saya ada bahasan lain, kalau dimasukkan dalam kesimpulan kurang tepat menurut saya Pak Luthfi. Mari kita fokus dulu, kita selesaikan dulu kawan-kawan ini, implikasi dari kebijakan yang salah itu kita tindak, tapi jangan kita mengkooptasi yang besar ini kita masukkan dalam hal-hal yang mungkin individu menurut saya tadi. Jadi saya setuju karena kesimpulan DPR RI dan Pemerintah hal-hal besar saja yang kita ambil dulu, itukan implikasi kalau penyimpangan urusannya aparat hukum atau yang lain itu bisa ditindak pihak lain. Tugas Komisi II DPR RI dan Menpan adalah mendorong supaya tenaga honorer yang 400 ribu lebih itu selesai tahun 2015 dengan dianggarkan di APBNP. Jadi Pak Menpan, kami akan mengawal itu jadi tidak usah ragu.

F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):

Pimpinan, sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Pak Tagore dari Aceh kalau tidak diberikan nanti tapi sudah mau Magrib ini.

F-PDIP (TAGORE ABUBAKAR):

Sedikit saja Pimpinan, ini untuk meluruskan saja. Biasanya untuk gaji mereka itu ada DAU yang dikirim ke daerah-daerah bukan khusus, supaya tidak keliru kita nanti. Jadi itu biasanya gaji itu ada DAU masing-masing daerah. Jadi di DAU saja ditambahkan, tidak mesti dianggarkan Menpan. Jadi dipersiapkan saja dananya khusus, biasanya itu setelah ada SK-nya nanti ini dikirimkan ke bupati masing-masing, jadi dia DAU dia bukan di Menpan, jangan salah pasang nanti.

Terima kasih, hanya mengingatkan.

MENTERI PANRB:

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri silakan.

MENTERI PANRB:

Yang disampaikan Pak Tagore benar, jadi memang penyebaran distribusinya tidak di Menpan tetapi di instansi masing-masing. Jadi menurut saya dalam proses penyelesaian K2 ini kami setuju ada batas waktu penyelesaian, namun kami juga mengharapkan keterlibatan dari Komisi II DPR RI sehingga sama-sama mengetahui dan intens dalam prosesnya. Jadi menurut saya formulasi ini sudah cukup menurut saya.

KETUA RAPAT:

Baik, 6 ini ada sedikit tambahan "Terhadap K2 yang dinyatakan tidak lulus, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk segera memberikan sikap yang tegas dan disertai solusi dan kebijakan yang bersifat aplikatif termasuk penganggaran dan selesai tahun 2015".

Kita harus juga nanti duduk bersama itu komitmen Komisi II DPR RI, kalau Komisi II DPR RI melepas ini tidak mungkin, Komisi II DPR RI tidak akan mungkin apalagi ini aspirasi dari masyarakat, akan duduk bersama nanti diselesaikan. Kita kan kesimpulan pertama sudah harus membina komunikasi yang baik. Jadi setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

7. Komisi II DPR RI akan mengundang Komisi Aparatur Sipil Negara dan LAN dalam waktu dekat untuk mendengarkan program kerja KASN dan LAN.

Saya kira dengan demikian.

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Pimpinan, sebentar Pimpinan.

Saya sedikit lagi nomor 7 ini, saya kira inikan tidak ada kaitannya dengan Menpan kesimpulan ini. Inikan agenda Komisi II DPR RI. Jadi menurut saya yang nomor 7 tidak perlu jadi kesimpulan, silakan

Raker dengan Menpan, jadi menurut saya tidak ada kaitan ini undangan KASN dan LAN ya silakan saja. Jadi hal-hal yang kita bahas di sini jadi kesimpulan, kalau mengundang ya silakan kita mau besok, mau lusa tidak ada hubungannya dengan Pak enpan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebenarnya LAN dan kaitannya dengan KASN tadi dijelaskan oleh Pak Deputi dan Kepala BKN, kita dari penjelasan tadi akan undang, jadi termasuk karena berkaitan dengan penjelasan tadi. Yang dijelaskan tadi itu adalah yang menyangkut pindah-pindah. Oleh karena itu,...

F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Begini Bapak Pimpinan, jadi kesimpulan ini hal-hal yang strategis saja, jadi kalau inikan teknis, ya terserah kita mau ngundang, mau besok atau lusa tidak perlu dicantumkan kesimpulan di sini. Kita setuju hal-hal yang berkembang tadi masuk KASN dan LAN, tapi hal mengundang mau kita jadikan kesimpulan. Itu loh maksud saya Pak, terserah Pimpinan mau besok tidak ada hubungannya dan izin Pak Menpan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, ini nanti ada menyangkut konfirmasi materi yang disampaikan itu saja sebenarnya dan kita bidang juga ini. Jadi Raker ini menjadi hal yang penting dan ini awal Raker yang pertama adalah yang terbaik. Jadi mau dibuang ya silakan dibuang yang penting K2 sudah selesai.

Cukup ya, dengan mengucapkan *Alhamdulillah* Rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan 6 kesimpulan dengan ini ditutup.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.30 WIB)

**Jakarta, 21 Januari 2015
Ketua Rapat**

Ttd

**Rambe Kamarul Zaman
A-236**



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)